PENDIDIKAN ANAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN

DI SMA 9 DAN SMP 59 SURABAYA

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Oleh:

DINO NUR WAHYU

E92215025

JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dino Nur Wahyu

NIM : E92215025

Jurusan : Studi Agama-Agama

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, April 2019
Saya yang menyatakan,

Dino Nur Wahyu
E92215025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Dino Nur Wahyu* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 26 April 2019

Pembimbing I,

Drs. H. Eko Tranggono, M.Pd.I
195506061986031004

Pembimbing II,

Dr. Nasruddin, S.Pd, MA
197308032009011005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Dino Nur Wahyu* ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 14 Mei 2019
Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:
Ketua,

Drs. H. Eko Tranggono, M.Pd.I
195506061986031004

Sekretaris,

Dr. Nasruddin, S.Pd, MA
197308032009011005

Penguji I,

Dr. Hj. Wiwik Setiyani, M.Ag
197112071997032003

Penguji II,

Feriyani Umi Rosidah, S.Ag, M.Fil. I
196902081996032003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DINO NUR WAHYU
NIM : E9221 5025
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan filsafat / Studi Agama - Agama
E-mail address : Aldiyo 69@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PENDIDIKAN ANAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI SMA 9 DAN SMP 59 SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 MEI 2019

Penulis

(Dino Nur Wahyu)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan Pada Penganutnya di Lingkungan Sekolah (Studi Pada SMA 9 dan SMP 59 Surabaya). Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kebijakan, praktek, dan evaluasi dari penidikan penghayat kepercayaan yang ada di kedua sekolah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori pendidikan multikultural untuk kebijakan, praktek, dan evaluasi yang dilakukan oleh kedua sekolah serta analisa domain dan taksonomi untuk mempermudah memahami data. Selain itu, peneliti juga menggunakan berbagai landasan hukum yang berkaitan dengan pengadaan pendidikan keagamaan atau keyakinan dengan tujuan mengkaji implementasi Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik nasional maupun lokal. Temuan lapangan adalah pendidikan anak penghayat kepercayaan pada kedua sekolah tersebut, SMA 9 sudah berlangsung selama hampir 2 tahun semenjak anak tersebut masuk ke sekolah, dan SMP 59 baru berlangsung belum setahun karena baru diadakan saat anak tersebut masuk ke sekolah itu. Tiap sekolah tersebut masing-masing hanya memiliki satu orang murid penghayat dengan seorang pengajar yang sama untuk kedua sekolah tersebut. Kedua sekolah tersebut tidak memiliki kebijakan tertulis terkait dengan pengadaan kelas tersebut, akan tetapi memiliki perlakuan yang berbeda terhadap tenaga pengajar terebut. Kemudian pada prakteknya, SMA 9 melakukan kegiatan pembelajaran pada perpustakaan sekolah atau laboratorium sekolah, sedangkan pada SMP 59 berlangsung pada rumah pengajar ataupun Sanggar tempat ibadah Sapta Darma. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa : (1) kedua sekolah telah memenuhi Undang-Undang dari pemerintah untuk pemenuhan hak pendidikan anak penghayat, (2) adanya perbedaan antara kedua sekolah tersebut dalam mendukung suksesnya praktek pengajaran tersebut, (3) karena Undang-Undang dan implementasi pendidikan Penghayat Kepercayaan ini masih baru, maka diperlukan evaluai agar dapat mengalami peningkatan dan perbaikan serta penyempurnaan kedepannya.

Kata Kunci : Pendidikan, Anak Penghayat, Sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM……..……..……..i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN……..……....ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…….…….……...iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI…….…....iv

HALAMAN MOTTO……..…….…….v

KATA PENGANTAR…….…….…….….…...vi

PERSEMBAHAN…….……...…….….ix

ABSTRAK ……..…….…..x

DAFTAR ISI…….…....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……...…….……1

B. Rumusan Masalah……..……..6

C. Tujuan Penelitian……...…..……..……..7

D. Kegunaan Penelitian……....……..……7

E. Penegasan Judul……...8

F. Telaah Pustaka……..……...……9

G. Kajian Teori…….……..……12

H. Sistematika Pembahasan……....……...……16

BAB II KAJIAN TEORI

1. Teori Pendidikan……..……...…..…….18

1.1. Teori Kebijakan Pendidikan Barclay Hudson.....…….. ……..18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.2. Teori Praktek Pendidikan George Edward C..……..... …… 19

1.3. Teori Evaluasi Pendidikan Hashbullah…….…….…..…...21

2. Teori Pendidikan Multikultural James Banks…….....…….....23

2.1. Pengertian Pendidikan Multikultural…….....……..……. 23

2.2. Sejarah Pendidikan Multikultural…….……..…….……...24

2.3. Pendekatan Dalam Proses Pendidikan Multikultural…… 28

2.4. Dimensi Pendidikan Multikultural….……..…….…… 29

3. Penghayat Kepercayaan…….……...…….30

3.1. Pengertian Penghayat…….……..…….……..30

3.2. Jenis Penghayat Kepercayaan……...…….….34

3.3. Penghayat Kepercayaan Sapta Darma…….35

4. Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional dan Lokal…….....….37

4.1. Pengertian Kebijakan Nasional dan Lokal……...…...37

4.2. Dasar Kebijakan Pendidikan Jawa Timur…….…….….38

5. Dasar Hukum Pendidikan Kepercayaan di Indonesia……..… 40

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian……...…….…….....44

2. Sumber Data dan Data Penelitian ……..……....45

3. Metode Pengumpulan Data…….……..…….……....47

4. Analisis Data……..……..…..49

BAB IV: PENYAJIAN DATA

A. Profil Lokasi……..……...…..53

1. SMA 9 Surabaya…...……...….……....53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. SMP 59 Surabaya…….…….……..…..55

B. Profil Siswa Penganut Penghayat Kepercayaan.……..…...…..……....58

1. Nanda Meg Ryan P. S……..……...…...58

2. Bangkit Mulya Sari…….……..……..……...58

C. Sejarah Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di Sekolah …...….....59

1. SMA 9 Surabaya……...…….……..……..……61

2. SMP 59 Surabaya……...……..……...…..62

D. Kebijakan Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan …….……....63

1. SMA 9 Surabaya……..……..……63

2. SMP 59 Surabaya……...……..……...……..64

E. Praktek pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan ...…..…… ….…….…..65

1. SMA 9 Surabaya……...……..……65

2. SMP 59 Surabaya……...……..…….……..…..67

F. Evaluasi Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan ……....69

1. SMA 9 Surabaya…….……..……..……...69

2. SMP 59 Surabaya……...……..……69

BAB V ANALISA DATA

A. Kebijakan Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di Sekolah ……....71

1. Kebijakan Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMA 9 …....71

2. Kebijakan Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMP 59 75

B. Praktek Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di Sekolah ……..…79

1. Praktek Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMA 9 ….....79

2. Praktek Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMP 59 ...…....82

C. Evaluasi Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di Sekolah ……..…86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Evaluasi Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMA 9 86
2. Evaluasi Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMP 59 ……..88

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan...……..……...…….93
B. Saran……...……..……..94

DAFTAR PUSTAKA……..96

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang penting dan sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.[1]

Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, -yang dalam hal ini termasuk keberagaman agama dan kepercayaan penghayat- seharusnya menjadi negara yang menjunjung tinggi keberagaman dan sikap pluralitas. Pluralitas agama merupakan realitas yang patut diterima sebagai wujud dari anugerah Tuhan, adanya pluralitas agama semata-mata pertimbangan aspek keragaman penilaian hak asasi manusia yang menempati persada bumi ini.[2]

Dalam proses perjalanan pendidikan di Indonesia yang *notabene*-nya adalah masyarakat yang plural, sepertinya belum bisa menerima keberadaan kelompok penghayat kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Diskriminasi pernah terjadi dan penganut penghayat kepercayaan masih menjadi korbannya.

---

[1] Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 32.

[2] Munawir Sjadzali, et al., *HAM dan Pluralisme Agama,* (Jombang: CV. Fatma, 1997), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu contoh kasusnya yakni yang terjadi pada siswa SMK 07 Semarang Zulfa Nur Rahman, yang merupakan salah satu siswa penganut penghayat kepercayaan dalam ranah pendidikan umum yang tak bisa naik kelas karena menolak untuk mengikuti ajaran agama yang tersedia di sekolah.[3] Kemudian dijelaskan bahwa ”pihak sekolah tidak menaikkan Zulfa karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang penghayat kepercayaan”, tutur Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jawa Tengah Achmad Zaid.

Pada kasus lain di Jawa Barat, diskriminasi sering terjadi hingga pada tahun 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat mewajibkan diadakannya Sarasehan guna menghimpun aspirasi kelompok penghayat kepercayaan, salah satunya yakni isu pendidikan anak kepercayaan.[4] Berikut adalah salah satu kasus diskriminasi dalam wilayah pendidikan bagi anak penganut penghayat kepercayaan di sekolah. Selain itu juga tindakan diskriminasi sekolah terhadap siswa juga terungkap dari kesaksian seorang penganut Sunda Wiwitan, Dewi Kanti, saat memberikan kesaksian pada sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi.[5]

---

[3] Rofiuddin, “Sekolah Berkukuh Siswa Penghayat Kepercayaan Tak Naik Kelas”, https://nasional.tempo.co/read/793197/sekolah-berkukuh-siswa-penghayat-kepercayaan-tak-naik-kelas (Senin, 24 Desember 2018, 18:24)

[4] Oki Wahyu Budijanto, *Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung*, Hak Asasi Manusia, Vol. 7 No. 1, Juli 2016, dalam *ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/69/16*, (24/12/2018).

[5] Kristian Erdianto, “Mendikbud Larang Sekolah Mendiskriminasi Siswa Penghayat Kepercayaan”, https://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/19223101/mendikbud-larang-sekolah-mendiskriminasi-siswa-penghayat-kepercayaan (Senin, 24 Desember 2018, 22:22).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diskriminasi dan tindakan intoleran pada anak penganut kepercayaan pada ranah sosial juga berpengaruh pada mental anak penganut kepercayaan. Faktor kondisi sosial yang tidak bisa atau belum sanggup menerima eksistensi penganut penghayat kepercayaan menjadi beban mental bagi orang tua maupun anak penganut kepercayaan tersebut.[6] Pihak penghayat kepercayaan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar mengenai ajaran mereka baru bisa melakukannya pada beberapa sekolah saja karena ada beberapa sekolah yang menolak untuk diadakannya pengajaran mengenai pengahayat kepercayaan.[7] Pihak penghayat kemudian melakukan solusi lain dari masalah tersebut dengan cara mengadakan pendidikan tentang keyakinan merka tidak hanya pada lingkungan sekolah, akan tetapi juga pada tempat ibadah dan rumah masing-masing.

Padahal, jika menggunakan dasar hukum sebagai pijakan, maka ada banyak undang-undang maupun peraturan pemerintah yang sekarang sudah bisa dijadikan dasar hukum oleh para penganut penghayat kepercayaan. Pada konteks penelitian ini, pendidikan agama adalah pendidikan keyakinan atau kepercayaan yang diberikan pada anak penghayat. Pendidikan agama peneliti jadikan sama karena tidak adanya hukum khusus tentang hak pendidikan agama yang menyebutkan penghayat kepercayaan.

---

[6] Dian Jennie Tjahjawati, *Wawancara*, Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya, 29 Oktober 2018.

[7] Dian Jennie Tjahjawati, *Wawancara*, Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya, 29 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembelajaran mengenai ajaran keyakinan penghayat kepercayaan ini dilakukan oleh tenaga pengajar dari pihak penghayat sendiri dikarenakan adanya permintaan dan tuntutan dari anak-anak penganut kepercayaan itu sendiri.[8] Anak penghayat melihat bahwa anak penganut agama bisa menerima pengajaran mengenai kepercayaan masing-masing membuat mereka juga ingin mendapatkan pendidikan yang sama dari ajaran mereka sendiri.

Jika ditelisik dan dicermati, pendidikan penghayat kepercayaan juga penting karena pada hakikatnya, aliran kepercayaan adalah sama dengan agama resmi di Indonesia. Kepercayaan mempunyai beberapa arti, seperti iman kepada agama, anggapan (keyakinan) bahwa benar sungguh ada, misal kepada dewa-dewa atau kepada roh-roh halus. Kepercayaan yang dimaksud pada penelitian kali ini adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa diluar agama atau tidak termasuk dalam agama apapun.[9]

Kelompok penghayat kepercayaan atau aliran kepercayaan, yang dalam konteks kenegaraan Indonesia saat ini, sudah diakui keberadaannya oleh Negara. Aktivitas keagamaan mereka seperti ibadah ataupun aktivitas yang bersifat sosial kelompok tersebut sudah dianggap sah dan dilegalkan oleh Negara. Penganut aliran kepercayaan kemudian memiliki inisiatif untuk mengajarkan keyakinan

---

[8] Dian Jennie Tjahjawati, *Wawancara,* Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya, 29 Oktober 2018.

[9] Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia,* (Jakarta: Yayasan Masagung, 1985), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah mereka anut kepada anak keturunan mereka atau anak-anak lain yang memiliki keyakinan sama.

Pada awal mulanya, para penganut penghayat kepercayaan melakukan kegiatan mengajar tersebut pada lingkungan sekitar yang sekiranya "aman" seperti pada tempat ibadah mereka masing-masing, atau di rumah. Akan tetapi, sekarang kelompok aliran kepercayaan juga memiliki inisiatif dan kepercayaan diri untuk melakukan kegiatan belajar mengajar doktrin keyakinan mereka pada lingkungan pendidikan,yang umumnya dilakukan masyarakat, yaitu sekolah.

Hal ini menjadi sangat penting karena sesuai dengan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasioal pada bab V peserta didik pasal 12 nomer 1 a: Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: "Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."[10]

Selain itu, Sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan. Artinya, siswa dibolehkan mengikuti mata pelajaran agama sesuai dengan kepercayaannya dan tidak wajib mengikuti pelajaran agama yang ditentukan pihak sekolah.[11]

---

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[11] Kristian Erdianto, "Mendikbud Larang Sekolah Mendiskriminasi Siswa Penghayat Kepercayaan", https://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/19223101/mendikbud-larang-sekolah-mendiskriminasi-siswa-penghayat-kepercayaan (Senin, 24 Desember 2018, 22:22).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki masyarakat yang berasal dari berbagai macam suku, ras, agama dan budaya. Dari sekian banyaknya masyarakat tersebut, ada diantara mereka yang memiliki anak dan menginginkan agar keturunannya tersebut dapat memahami keyakinan yang mereka percayai melalui sekolah mereka menimba ilmu dan berkumpul bersama teman.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian sementara, ada dua contoh sekolah yang telah melaksanakan pendidikan untuk anak penganut penghayat kepercayaan tersebut di Surabaya, yakni SMA 9 Surabaya dan SMP 59 Surabaya.[12] Kedua sekolah tersebut adalah termasuk sekolah dengan kategori umum yang berarti ada banyak jenis siswa dengan berbagai latar belakang baik dari suku, ras dan agama di dalamnya. Berkaca dari serangkaian kejadian konflik dan peraturan maupun undang-undang maka peneliti berinisiatif untuk melakukan kegiatan penelitian pada praktek pendidikan anak penghayat kepercayaan yang baru belakangan ini dilaksanakan pada dua sekolah di Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pendidikan agama bagi anak-anak penghayat kepercayaan di SMA 9 Surabaya dan SMP 59 Surabaya?

[12] Dian Jennie Tjahjawati, *Wawancara,* Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya, 29 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana praktek pendidikan agama bagi anak-anak penghayat kepercayaan di SMA 9 Surabaya dan SMP 59 Surabaya?

3. Bagaiaman evaluasi praktek pendidikan agama bagi anak-anak penghayat kepercayaan di SMA 9 Surabaya dan SMP 59 Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan pendidikan para penganut aliran kepercayaan di SMA 9 Surabaya dan SMP 59 Surabaya.

2. Untuk menerangkan praktek pendidikan bagi para penganut aliran kepercayaan di SMA 9 Surabaya dan SMP 59 Surabaya.

3. Untuk menguraikan evaluasi praktek pendidikan agama bagi anak-anak penghayat kepercayaan di SMA 9 Surabaya dan SMP 59 Surabaya.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan manfaat memperkaya keilmuan pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya khususnya program studi Studi Agama-Agama tentang hak pendidikan agama pada penganut aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan pada lingkungan pendidikan seperti sekolah serta lingkungannya. Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelas mata kuliah Agama Civil Society, Agama dan HAM, dan Aliran Kepercayaan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran pada pembaca dan masyarakat tentang kondisi sosial masyarakat dalam memandang eksistensi penghayat kepercayaan serta adanya kegiatan edukasi keagamaan aliran kepercayaan atau kelompok penghayat kepercayaan.

E. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul "**Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMA 9 dan SMP 59 Surabaya**". Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketidakjelasan pada judul tersebut, maka dijabarkan oleh peneliti setiap kata dalam judul tersebut yakni:

Pendidikan Anak : Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. dalam penelitian ini dilakukan dalam SMP dan SMA. Karakteristik anak SMP yakni berada pada masa pubertas (10-14 tahun). Sedangkan karakteristik anak SMA adalah usia remaja, yang merupakan masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa (12-21 tahun).[13]

Penghayat Kepercayaan : Kepercayaan (keyakinan) terhadap Tuhan Yang Maha Esa di luar agama dan bukan agama baru, melainkan bagian dari kebudayaan nasional.[14] Dalam penelitian ini, keyakinan yang diajarkan pada sekolah hanyalah Sapta Darma.

Studi SMA 9 dan SMP 59 : Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini.

F. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti melihat dan berkaca dari hasil penelitian yang pernah dilakukan yang memiliki tema dan pola yang senada dengan penelitian ini. Beberapa refrensi yang digunakan berupa buku, jurnal, dan skripsi sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini. Berikut adalah sumber tinjauan pustaka yang digunakan peneliti:

Pertama, menggunakan Kovenan Sipil Politik dan Kovenan Ekonomi Sosial Budaya yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).[15] Sumber-sumber ini digunakan sebagai dasar acuan hukum dan bisa

---

[13] Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik Panduan bagi Orang Tua dan Guru dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD*, SMP, dan SMA, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 37.

[14] Mutholib Ilyas, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia,* (Surabaya: CV AMIN Surabaya, 1988), 10.

[15] Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Kovenan Sipil dan Politik.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didapatkan dari internet. Selain itu, dapat digunakan dalam penulisan ini sebagai dasar acuan hak dalam beragama dan hak mendapatkan pendidikan.

Kedua, Jurnal Hak Asasi Manusia yang bisa diakses melalui internet.[16] Jurnal ini memuat banyak tulisan tentang Hak Asasi Manusia mulai dari kasus pelanggaran, undang-undang, hingga peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kebebasan berkeyakinan yang sering terjadi Indonesia.

Ketiga, Skripsi berjudul *Agama dan HAM : Studi Kasus Tentang Kolom Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk* yang disusun oleh Muhammad Kholid Ismatulloh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya program studi Perbandingan Agama. Permasalahan dalam skripsi ini yakni : isu diskriminasi dalam pencantuman penghayat kepercayaan dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam skripsi ini, subjek penelitian adalah penganut penghayat kepercayaan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana korelasi pencantuman dalam kolom agama di KTP dengan hak-hak kewarganegaraan serta pelanggaran kebabasan beragama. Hasil penelitian ini adalah negara menjamin kebebasan dalam beragama demi hukum, hal ini ditunjukkan dengan mulai gencarnya pembuatan berbagai undang-undang maupun peraturan mengenai kebebasan

[16] Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 7 No. 1, Juli 2016, dalam *ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/69/16*, (08/5/2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama. Penemuan kedua yakni bahwa kolom agama tidak menjadi masalah dalam kehidupan keberagaman di Indonesia secara umum.[17]

Keempat, Skripsi berjudul *Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Right* yang disusun oleh bernama Theresia Faradila Rafael Nong mahasiswi program studi Hukum Internasional Universitas Hasanuddin Makassar.[18] Permasalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah : kewajiban negara dalam pemenuhan hak pendidikan serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah-sekolah pada kota Makassar dengan berdasarkan pada *International Covenant On Economic Social And Cultural Right.* Penelitian ini berfokus pada analisa untuk mengungkapkan sejauh mana terpenuhinya hak pendidikan yang menjadi kewajiban Negara untuk memenuhinya di kota Makassar. Hasil pada penelitian ini adalah negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan pendidikan, kewajiban itu terdiri atas *Obligation of Conduct* dan *Obligation of Result.* Hasil lainnya yakni pelaksanaan pendidikan di kota Makassar masih kurang. Masih sering terjadi pungutan-pungutan, kurangnya fasilitas, sehingga berdampak atas pemenuhan hak pendidikan anak di kota tersebut.

---

[17] Muhammad Kholid Ismatulloh, "Agama dan HAM : Studi Kasus Tentang Kolom Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2017).

[18] Theresia Faradila Rafael Nong, "Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Right", (Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Hukum Internasional Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, yaitu buku karangan Bikhu Parekh yang berjudul *Rethinking Multiculturalism.*[19] Buku ini banyak membahas tentang keberagaman budaya dalam suatu tempat. Selain itu juga membahas mengenai bagian-bagian dalam lingkungan social tersebut yang memiliki pengaruh seperti hubungan kaum minoritas dan mayoritas, hak-hak dan kewajiban satu sama lain dalam suatu lingkungan.

Keenam, buku yang ditulis James Banks dengan judul *Multikultural Education Issues and Perspective.*buku ini berisi tentang teori-teori yang berkenaan dengan pendidikan multikultural.[20] Teori pendidikan multikultural dari buku ini akan dijadikan dasar untuk menilai seberapa juh praktek pendidikan yang bernilai multikultural padakedua sekolah yang dijadikan tempat dalam penelitian ini.

G. Kajian Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya pada ranah pendidikan keagamaan, kebebasan beragama dan sosiologi agama dalam memandang munculnya penghayat kepercayaan dalam lingkup pendidikan umum. Dalam peneitian ini, menggunakan dua teori, pertama yakni tokoh yang bernama Will Kymlicka dan kedua teori Pendidikan Multikultural milik James Banks.

---

[19] Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism,* (Yogyakarta: Penerbit Kansiius, 2008).

[20] James A. Banks, Cherry A. McGee Banks edt., *Multikultural Education Issues and Perspective,* (Amerika: John Wiley dan Sons, 2010),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kymlicka lebih menekankan pada keberagaman multikulural pada lingkungan liberal serta hak minoritas terhadap mayoritas menyebutkan tentang hak-hak minoritas yang sering dibatasi oleh pihak mayoritas. Pembatasan ini bisa berupa pembatasan hak-hak kulturnya untuk mengekspresikan diri, menunjukkan ciri khas budaya dan gaya hidupnya sendiri.[21] Kymlicka mengemukakan bahwa manusia memiliki minat yang esensial dalam menjalani hidup yang baik. Hal ini menyangkut dua hal. Pertama, mereka harus mengalami hidup mereka dari dalam, yakni, sesuai dengan kepercayaan mereka tentang apa yang memberi nilai pada hidup.[22] Dalam kaitannya dengan penelitian ini, minat dalam menjalani hidup yang baik ini salah satunya dengan mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan aliran kepercayaan yang di imani dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan edukasi pendidikan keturunan penghayat kepercayaan.

Dalam pemikirannya selanjutnya, Kymlicka mengungkapkan bahwa manusia adalah "mahluk kebudayaan", bukan dalam pengertian komunitarian yang dibentuk oleh kebudayaan-kebudayaan mereka, akan tetapi dalam pengertian kebudayaan adalah hal yang penting bagi perkembangan mereka sebagai manusia.[23] Kebudayaan yang mereka miliki atau identitas yang dimiliki oleh kelompok penghayat kepercayaan tersebut kemudian diturunkan kepada generasi

---

[21] M. Nur Prabowo, *Kewarganegaraan Multikultural (Pembelaan Will Kymlicka atas hak-hak Minoritas Bangsa dan Etnis*, Jurnal Rasail Stebi AlMuhsin: Edisi 4, No. 7, dalam http://jurnalrasailstebi.almuhsin.ac.id/jurnal/Edisi4/7.%2520M.%2520Nur%2520Prabowo%2520S.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwix7N_v9ZbbAhVGp48KHaX_DZAQFjAAegQICBAB&usg=AOvVaw3L8V2j1s0NQQfztwumtmqP (8/11/2018).

[22] Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), 139.

[23] Ibid., 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerusnya yakni dengan pendidikan. Pendidikan yang diperlukan dalam hal ini adalah pendidikan multkultural Prof. Dr. Syafiq A. Mughni, M.A mengungkapkan, bahwa pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan struktur dan proses dimana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi.[24] Dalam pendidikan multicultural, setiap peradaban dan kebudayaan berada dalam posisi yang sama dan sejajar. Tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi atau dianggap lebih tinggi (*superior*) dari kebudayaan yang lain. Teori ini dapat digunakan pada penelitian ini karena sejatinya, penghayat kepercayaan dengan agama adalah sama kedudukannya. Karena memiliki kedudukan yang sama itulah, maka anak-anak penganut penghayat kepercayaan juga berhak mendapatkan hak pendidikan keyakinan yang sama seperti penganut agama pada umumnya.

Pendidikan untuk para penganut penghayat kepercayaan diperlukan karena pada hakikatnya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Dalam masyarakat yang multikultural tersebut, dibutuhkanlah pemahaman akan multikulturalisme. Musa Asy'arie menuturkan, bahwa multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu segera muncul, jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan dirinya sendiri yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks, dan karenanya muncul kesadaran bahwa keanekaragaman dalam suatu realitas dinamika

[24] Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), xiii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan.[25]

Kemudian, teori yang kedua yakni milik James Banks mengenai pendidikan multikultural. Dalam bukunya *Multikultural Education Issues and Perspective* Banks menjelaskan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu ide atau gagasan, pendidikan yang maju, dan sebuah proses yang memiliki tujuan untuk merubah struktur dari institusi pendidikan agar murid laki-laki dan perempuan, murid berkebutuhan khusus, dan murid dari ras, etnis, suku, bahasa dan budaya yang berbeda-beda memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan. Sesuai dengan penelitian ini, peneliti ingin mengkaji dan meneliti seberapa jauh terpenuhinya hak pendidikan yang sekarang sudah dimiliki oleh anak penganut penghayat kepercayaan di Indonesia.

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana pendidikan dapat berjalan dengan semestinya. Paolo Freire mengemukakan bahwa pendidikan harus difungsikan untuk pembebasan (*liberation*) dan bukan penguasaan (*domination*). Pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan, bukan domestikasi dan bukan penjinakan sosial budaya (*social and cultural domestication*). Pendidikan bertujuan menggarap realitas manusia sehingga secara metodologis bertumpu pada prinsip aksi dan refleksi total, yakni prinsip mengubah realitas yang menindas sekaligus secara bersamaan dan terus menerus berusaha menumbuhkan

[25] Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran akan realitas dan hasrat untuk merubah kenyataan yang menindas tersebut.[26]

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini disusun secara urut, sistematis dan terbagi ke dalam 6 (enam) bab. Setiap bab menjelaskan penelitian yang dilakukan peneliti secara lugas dan sistematis. Bab-bab berikut adalah:

Bab I (satu) yaitu membahas mengenai pendahuluan untuk penelitian ini. Isi atau sub bab dari bab 1 adalah meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) yaitu menjelaskan tentang teori yang dimana digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, akan membahas mengenai hak pendidikan yang harusnya didapatkan oleh penyelenggara edukasi agama penghayat kepercayaan. Selain itu juga membahas mengenai teori hak minoritas terhadap mayoritas.

Bab III (tiga) membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa taksonomi milik James Spradley.

---

[26] Edi Susanto, *Pendidikan Agama Berbasis Multikultural (Upaya Strategis Menghindari Radikalisme)*, Karsa, Vol. IX, No. 1, April 2006 dalam https://www.researchgate.net/profile/Edi_Susanto7/publication/268409821_PENDIDIKAN_AGAMA_BERBASIS_MULTIKULTURAL_Upaya_Strategis_Menghindari_Radikalisme/links/5593e83308ae5af2b0ecd053.pdf, (28/11/2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV (empat) membahas mengenai data umum yang didapatkan dilapangan mengenai praktek pengajaran penghayat kepada penganutnya di lingkungan pendidikan umum. Kemudian juga berisi tentang kebijakan sekolah dan respon sosial terhadap adanya praktek pengajaran penghayat kepercayaan tersebut.

Bab V (lima) berisi tentang analisa data. Analisa disini dipadukan antara hasil penelitian yang didapatkan dilapangan mengenai praktek pengajaran penghayat kepercayaan pada penganutnya, kebijakan sekolah serta respon lingkungan sosial terhadap praktek tersebut dengan teori yang dimiliki oleh peneliti.

Bab VI (enam) yakni penutup yang berisi kesimpulan dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan yang terdapat di dalam bab ini dapat menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah di bab I, sedangkan saran dapat digunakan pembaca baik sebagai acuan ataupun untuk sekedar titik tolak ukur perkembangan penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Teori Pendidikan

1.1. Teori Kebijakan Pendidikan Barclay Hudson

Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain.[27] Kebijakan dalam pendidikan ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur pengelolaan sekolah yang diatur tidak hanya kurikulum, pedagogi, dan penilaiannya, tetapi juga kondisi guru dan pemeliharaan sarana fisik sekolah . fungsi kebijakan pendidikan adalah: 1) menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan dan 2) melambangkan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru.[28]

Ada beberapa teori perumusan kebijakan pendidikan, milik Barclay Hudson, yakni:

---

[27] Udin, *Pengembangan Kebijakan Pendidikan Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Diakses dari https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36920354/Aminuddin_Bakry.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1551892854&Signature=JAu7CfYOlE9JWD2o03rvBTHpHQs%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEBAGAI_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdf, Diakses Tangal Maret 2019 (22:50).

[28] Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Teori radikal, menekankan pada kebebasan lembaga lokal dalam menyusun sebuah kebijakan pendidikan. Semua kebijakan pendidikan terkait praktek dan perbaikan di tingkat daerah diserahan pada daerah.
2. Teori advokasi, pada teori ini pemerintah pusat sangat perlu menyusun kebijakan pendidikan yang bersifat nasional demi kepentingan umum, serta demi melindungi lembaga-lembaga yang masih marginal .
3. Teori transaktif, perumusan kebijakan sangat perlu didiskusikan dengan semua pihak, secara bersamaan dan dengan perlu melibatkan sebanyak mungkin pihak yang terkait.[29]

1.2. Teori Praktek Pendidikan George Edward C

Praktek pendidikan sebagai suatu implementasi dari kebijakan pendidikan merupakan tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan tersebut. Praktek atau kebijakan bisa jadi sangat rumit dan kompleks dibandingkan dengan perumusannya. Dalam implementasinya, baik pemerintah, masyarakat serta sekolah idealnya secara bersama-sama saling membantu bekerja dan melasanakan tugas-tugasnya dalam implementasi kebijakan yang dimaksud.[30]

George C. Edward III (1980) mengemukakan empat vairabel agar implementasi kebijakan pendidikan menjadi efekif, yaitu:

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan pendidikan dikomunikasikan pada organisasi publik, ketersediaan sumber daya

[29] Hashbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Inddonesia,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 73.

[30] Ibid., 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan pendidikan disusun.

2. Sumber daya, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.[31]
3. *Disposition*, berkenaan dengan ketersediaan implementor untuk mengeksekusi kebijakan tersebut. Ketersediaan dan komitmen diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan.
4. Struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi atau praktek kebijakan pendidikan. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic pragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Tiga unsur penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, (2) *target group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan, (3) unsur pelaksana (*implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggungjawab

[31] Hashbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Inddonesia,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memperolah pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.[32]

Dalam prakteknya, ada beberapa jenis metode pembelajaran, yakni[33]:

1) Metode Konvensional

   Metode ini adah metode pengajaran dengan cara ceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa.

2) Metode Diskusi

   Metode yang pengajarannya erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini dilakukan secara berkelompok.

3) Metode Resitasi

   Ini adalah metode mengajar dengan mengharuskan siswanya membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru, dengan menuliskannya di kertas dan menggunakan bahasa sendiri.

4) Metode Inquiry

   Metode ini aalah metode yang dimana guru mengharuskan siswanya untuk dapat menjelaskan kembali apa yang telah didapatnya selama pembelajaran berlangsung.

1.3. Teori Evaluasi Pendidikan Hashbullah

Secara formal, evaluasi merupakan tahap terakhir dari sebuah proses pembuatan kebijakan dengan tujuan menghasilkan masukan-

---

[32] Hashbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Inddonesia,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 104.

[33] Anonim, "20 Macam Macam Metode Pembelajaran Lengkap", Dosen Psikologi, https://dosenpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran , (Selasa, 9 April 2019, 06:58).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masukan guna penyempurnaan kebijakan atau perumusan kebijakan selanjutnya.[34] Evaluasi memiliki karakteristik sebagai perbandingan hasil penilaian dengan suatu norma atau kriteria yang ada, hasilnya bersifat kulitatif, dan dinyatakan secara deskriptif.[35]

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yaitu: (a) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. (b) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, (c) mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan, (d) mengukur dampak suatu kebijakan, (e) untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, (f) sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.[36]

Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya merujuk pada dua aspek, yaitu:

Pertama: aspek proses, menunjuk bahwa apakah selama implementasi program, seluruh pedoman kebijakan telah dilakukan secara konsisten oleh para implementor di lapangan.

Kedua: aspek hasil, menunjuk apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan (*output dan outcomes*).[37]

---

[34] Hashbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Inddonesia,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 117,

[35] Kusaeri, *Acuan dan teknik Penilaian Proses dan Hasil Belajar Dalam Kurikulum 2013*, (Surabaya: Ar-RuzzMedia, 2014), 18.

[36] Hashbullah, *Kebijakan Pendidikan*, 117.

[37] Hashbullah, *Kebijakan Pendidikan*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teori Pendidikan Multikultural James Banks

2.1. Pengertian Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang konsepnya menekankan pada keanekaragaman pada kesederajatan. James Banks, mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan tentang *people of colour*. Yang berarti pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai suatu keniscayaan, kemudian bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan toleran dan semangat egaliter.[38] Lebih jelasnya, pendidikan multikultural adalah suatu ide atau gagasan, pendidikan yang maju, dan sebuah proses yang memiliki tujuan untuk merubah struktur dari institusi pendidikan agar murid laki-laki dan perempuan, murid berkebutuhan khusus, dan murid dari ras, etnis, suku, bahasa dan budaya yang berbeda-beda memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan.[39] Pendidikan ini berpijakan pada keadilan sosial dan hak pendidikan yang sama serta dedikasi untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang diperlukan setiap siswa-siswi untuk mencapai potensi penuh mereka sebagai seorang pelajar.[40] Spradley menitikberatkan multikultural pada proses transaksi pengetahuan dan

---

[38] Wiyanto, "Implementasi Nilai-Nilai Multikultural pada Sekolah Multi-Etnik (Studi Interaksi Sosial Di SMA Karangturi)",Jurnal Ecodunamika, Vol 1 No. 3 Tahun 2018 dalam http://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/view/1754 , (22/2/2019).

[39] James A. Banks, Cherry A. McGee Banks edt., *Multikultural Education Issues and Perspective*, (Amerika: John Wiley dan Sons, 2010), 1.

[40] Paul C. Gorski, *Multicultural Education and The Internet*, (New York: The McGraw-Hill Companies, 2005), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk menginterpretasikan pandangan dunia mereka yang berbeda untuk menuju kearah kebaruan kultur.[41]

2.2. Sejarah Pendidikan Multikultural

Berdasarkan sejarahnya, pendidikan multikultur merupakan sebuah kritik bagi sistem pendidikan yang Eropasentris dengan muatan monokultur dari sistem pendidikan yang berlaku.[42] Selain itu juga terlahir dari bagian perjuangan hak asasi manusia (HAM) pada tahun 1960an di Amerika Serikat. Pada saat itu orang-orang etnis Afrika-Amerika sekolah dan intitusi pendidikan apapun untuk ikut mereflekikan sejarah, budaya, dan pengalaman berdasarkan perspektif mereka. Selain tu mereka juga meminta sekolah untuk menampilkan figur orang sukses dari masing-masing ras dan etnis untuk bisa memotivasi murid dan memberikan gambaran orang sukses yang se etnis dengan murid-murid tersebut.[43]

Eropasentrisme menyatakan dua tesis. Yang pertama, peradaban eropa modern, yang terjadi pasca abad ke-17 dimana peradaban Eropa mempresentasikan kehidupan tertinggi yang sejauh ini dicapai umat manusia dan memberikan tolok ukur baku untuk menilai sesamanya. Yang

---

[41] Wenni Wahyuandari, Desi Rahmawati, *Pendidikan Multikultural Studi Kasus di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Tulungagung,* Jurnal Universitas Tulungagung Bnorowo, Vol. 2 No. 1, Tahun 2014, dalam http://jurnal-unita.org/index.php/bonorowo/article/view/32 , (22/2/2019).

[42] Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism,* (Yogyakarta: Penerbit Kansiius, 2008), 299.

[43] James A. Banks, Cherry A. McGee Banks edt., *Multikultural Education Issues and Perspective,* (Amerika: John Wiley dan Sons, 2010), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua, peradaban tersebut mendapatkan kejayaannya tanpa bantuan, dan berhutang sedikit (jika ada) kepada peradaban-peradaban non-Eropa.

Ada tiga hal (seluruhnya Eropasentris) yang mempengaruhi pembentukan tersebut. Ketiga hal tersebut adalah pertama dasar-dasar intelektual dan politik yang diletakkan oleh bangsa Yunani dan Roma klasik, dasar-dasar moral dan keagamaan yang diletakkan oleh agama Kristen, dan kemunculan individualisme, sekularisme, sains dan teknolgi, dan lainnya, yang dianggap sebagi pencapaian Eropa modern yang unik dan didasarkan pada warisan pra-modern.[44] Etos umum yang mengembangkan sistem pendidikan menekankan pada kejayaan dan keunikan peradaban Eropa dan melemahkan atau mengabaikan pencapaian dan kontribusi orang lain, hal ini mengakibatkan keterbatasan sistem pendidikan monokultur semacam itu cenderung tidak membangkitkan keingintahuan intelektual tentang budaya lain, karena mereka tidak dihadapkan pada kebudayaan tersebut atau karena mereka tidak mendapatkan pengetahuan yang komprehensif, atau keduanya.[45]

Pendidikan semacam itu cenderung tidak mengembangkan kemampuan imajinatif dan juga menghambat kemampuan kritis. Para murid cenderung menilai budaya dan masyarakat lain menurut norma dan tolok ukur mereka sendiri, menganggapnya aneh, bahkan tidak berharga. Monokultur juga cederung mengembangkan arogansi, ketidakpekaan, dan

---

[44] Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism,* (Yogyakarta: Penerbit Kansiius, 2008), 300.

[45] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasisme.[46] Hal ini menyebabkan siswa terkekang dalam bingkai kerja kebudayannya sendiri, siswa tidak dapat menerima keanekaragaman nilai, kepercayaan, jalan hidup dan pandangan dunia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi manusia. Dengan demikian, pendidikan monokultur bukan merupakan pendidikan yang baik.

Pendidikan yang baik harus menghadapkan para murid terhadap konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang hidup yang sukses, sistem keyakinan dan bentuk konseptualisasi pengalaman-pengalaman umum, dan mengajak siswa masuk ke dalam semangat budaya lain, melihat dunia dengan cara yang dilakukan orang lain dan menghargai segala kekuatan dan keterbatasannya.[47] Sistem pendidikan tersebut harus membantu para siswa memahami sejarah, struktur sosial, budaya, bahasa, dan lain sebagainya dalam komunitas kultural dan politik mereka agar mampu memahami diri secara lebih baik dan menemukan jalan di sekitar komunitas-komunitas tersebut. Sejatinya, pendidikan multikultur merupakan pendidikan dalam kebebasan, baik dalam arti kebebasan dari prasangka dan bias etnosentris maupun kebebasan untuk mengeksplorasi dan belajar dari kebudayaan dan perspektif lain.[48] Pendidikan

---

[46] Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism,* (Yogyakarta: Penerbit Kansiius, 2008), 300.

[47] Ibid., 302.

[48] Ibid., 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berparadigma multikultural mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan iklusif.[49]

Pendidikan multikultural adalah sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnis, agama, status sosial, ekonomi dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan.[50] Kesadaran akan multikulturalisme dapat berkembang dengan baik apabila dilatihkan dan didikkan pada generasi muda lewat jalur pendidikan.[51]

Bidang yang paling relevan bagi prinsip-prinsip pendidikan multikultural adalah kurikulum. Ada dua syarat syarat yang harus terpenuhi bagi pendidikan multikultur, yakni:

a. Tidak boleh terlalu sempit, hal ini dikarenakan para siswa harus membiasakan diri dengan bentuk-bentuk dari perwakilan utama pada pokok pengenalan dunia yang ada pada pendidikan seperti sejarah, sastra, dan budaya dengan tujuan mengenalkan murid-murid pada komunitas mereka. Hal ini diharapkan agar dapat mendorong murid untuk lebih memahami, menjelajahi perbedaan, dan saling keterikatan

[49] Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern,* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), 191.

[50] Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 168.

[51] Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan,* 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara sau dengan lainnya diantara mereka.[52] Grant dan Sleeter menyebut pendekatan ini sebagai "pembelajaran satu kelompok", pembelajaran seperti ini biasanya diambil oleh murid yang juga merupakan bagian dari kelompok yang dipelajari tersebut.[53]

b. Dialog yang bermanfaat, perlunya dialog yang bermanfaat antar siswa mengenai tema yang mendalam seperti perbudakan, kolonialisme, kedudukan perempuan, revolusi industri, dan lain sebagainya dengan tujuan murid yang terlibat akan dapat memiliki pengalaman yang berbeda dan mencapai penilaian yang berbeda terhadap masalah masalah yang dibahas. Selain itu juga untuk memperluas simpati, mengajak siswa menghargai kompleksitas kebenaran dan keranekaragaman penafsiran yang tidak dapat disederhanakan.[54]

2.3. Pendekatan Dalam proses pendidikan Multikultural

Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikltural, yaitu[55]:

1. Tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*), atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal.
2. Menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik.

---

[52] Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism,* (Yogyakarta: Penerbit Kansiius, 2008), 303.

[53] James A. Banks, Cherry A. McGee Banks edt., *Multikultural Education Issues and Perspective,* (Amerika: John Wiley dan Sons, 2010), 1.

[54] Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism,* 305.

[55] Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dibutuhkannya interaksi sosial yang bertentangan dengan sekolah-sekolah yang mengelompokkan siswa secara terpisah antar etnik.
4. Meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan.
5. Pendidikan (baik formal maupu non fomal) akan meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan.

2.4. Dimensi Pendidikan Multikultural

James Banks menyebutkan ada beberapa dimensi dalam pendidikan multicultural yang terkait satu sama lain, yakni:

1. *Content Integration,* yaitu mengintegrasikan contoh budaya dan atau kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generlisasi, dan teori dari suatu mata pelajaran atau disiplin ilmu.
2. *The Knowledge Construction Process*, pemahaman mengenai implikasi asumsi, perspektif, dan bias budaya kedalam sebuah disiplin ilmu.[56]
3. *Prejudice Reduction,* cara yang digunakan guru untuk menjelaskan, beraktivitas, menetukan metode pengajaran sesuai dengan ras, etnis, dan budaya murid yang berbeda-beda.[57]
4. *An Equity Pedagogy,* menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dengan tujuan memfasilitasi prestasi akademik yang beragam, baik dari segi ras, budaya, etnis, maupun sosial.
5. *An Empowering School Culture And Social Structure,* sekolah yang memberikan figur keragaman ras, budaya, gender, dan keadilan sosial.[58]

---

[56] James A. Banks, Cherry A. McGee Banks edt., *Multikultural Education Issues and Perspective,* (Amerika: John Wiley dan Sons, 2010), 20.

[57] Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penghayat Kepercayaan

3.1. Pengertian Penghayat

Istilah kepercayaan merupakan sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk dari salah satu agama-agama resmi. sebelum ditetapkan dengan nama "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa", istilah "kepercayaan" atau kebatinan" lebih populer. Literatur banyak menggunakan sebutan "kepercayaan" atau kebatinan" itu. dalam legalitas konstitusionalnya, penggunaan istilah "kepercayaan" lebih dahulu dari pada istilah-istilah lain. sebutan itu diusulkan pertama kali oleh KRMT Wongsonegoro dalam sidang Badan Penyelidik usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 13 Juli 1945. sedangkan pihak pemerintah (Departemen Agama) lebih mengintroduksi sebutan "aliran kepercayaan" ketika merintis Biro Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat).[59]

Kata "kepercayaan", secara semantik (pengetahuan tentang seluk beluk dan pergeseran arti kata-kata) memiliki arti iman kepada agama, maksudnya kepercayaan yang berkenaan dengan agama, anggapan (keyakinan) bahwa benar sungguh ada, misal kepercayaan bahwa dewa-dewa, orang-orang halus itu benar-benar ada atau sungguh ada, dianggap benar dan jujur. Menurut istilah, "kepercayaan" adalah kepercayaan

---

[58] James A. Banks, Cherry A. McGee Banks edt., *Multikultural Education,* 22.

[59] Ahmad Choirul Rofiq, *Kebijakan Pemerinrtah Terkait HakSipil Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya Terhadap Perakembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo,* Jurnal KodifikasiA, Vol. 8 No. 1 tahun 2014, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(keyakinan) terhadap Tuhan Yang Maha Esa di luar agama dan bukan agama baru, melainkan bagian dari kebudayaan nasional.[60] Lengkapnya, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu sistem kepercayaan atau sistem spiritual yang ada di Indonesia selain agama, aliran, faham, sekte atau madzhab agama tersebut.[61]

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tertampung dalam pasal 29 UUD 1945 dan dipertegas dalam P-4 dn GBHN adalah warisan kekayaan kerohanian yang bukan agama yang dalam kenyataannya merupakan bagian dari kebudayaan bangsa yang hidup dan dihayati serta dilaksanakan oleh sebagian rakyat Indonesia sebagai budaya spiritual. Sedangkan dalam sarasehan Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun 1981, kepercayaan dirumuskan sebagai pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budi luhur.[62]

Kepercayaan adalah sebutan bagi kelompok masyarakat yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Kepercayaan juga berarti suatu aliran yang mempunyai

---

[60] Mutholib Ilyas, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia,* (Surabaya: CV AMIN Surabaya, 1988), 10.

[61] Ridin Sofwan, *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa),* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1999), 1.

[62] Suradi, *Pedoman Teknis Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kebijaksanaan Teknis Operasional Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,*(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paham yang bersifat dogmatis yang terjalin dengan adat istiadat hidup sehari-hari dari berbagai suku bangsa yang mempercayai terhadap apa saja yang dipercayai adat nenek moyang.[63] Penghayat sendiri adalah penganut yang melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran yang utuh hingga kedalaman batin, jiwa dan rohani.[64]

Setelah sebutan "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" dibakukan sejak Sidang Umum MPR 1973 dan diperkuat dalam SUMPR 1978, para pendukungnya mulai membakukan definisi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sejak 1980. Mereka menyatakan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengalaman budi luhur.

Kemudian Direktorat Jenderal Kebudayaan mendefinisikan bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah budaya spiritual yang berunsurkan tuntunan luhur dalam perilaku, hukum dan ilmu suci, yang dihayati oleh penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan membina keteguhan dan kewaspadaan batin serta menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihan jiwa dan kedewasaan rohan, demi mencapai

---

[63] Suradi, *Pedoman Teknis Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kebijaksanaan Teknis Operasional Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,*(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), 11.

[64] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia ini dan di alam yang kekal.[65]

Dalam kenyataan terdapat penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah berorganisasi lengkap dengan nama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan ada yang belum terwadahi dalam suatu organisasi.[66] Penghayat kepercayaan memiliki identitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ikenal dengan berbagai sitilah, yaitu tuntunan, ajaran atau ilmu (kawruh) kebatinan, kejiwaan dan kerohanian, dengan corak bentuk wadah, pelaksanaan serta pengalaman yang beraneka ragam, namun yang didalamnya terkandung unsur dan sifat yang sama yaitu perilaku, ilmu dan hukum suci yang merupakan pancaran dan penjabaran kepercayaan serta keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diberkati petunjuk dan tuntunan-Nya.[67]

Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki beberapa karakteristik, yakni: (1) kalangan Penghayat Kepercayaan senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2)

---

[65] Ahmad Choirul Rofiq, Kebijakan Pemerinrtah Terkait HakSipil Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya Terhadap Perakembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo, Jurnal KodifikasiA, Vol. 8 No. 1 tahun 2014, 7.

[66] Suradi, *Pedoman Teknis Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kebijaksanaan Teknis Operasional Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,*(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), 12.

[67] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan bersifat akomodatif terhadap anasir dari kebudayaan spiritual lain. (3) Penghayat Kepercayaan mengutamakan kerukunan.[68]

3.2. Jenis Penghayat Kepercayaan

Di Indonesia kelompok yang merujuk pada sebutan penghayat kepercayaan, setidaknya mengandung empat elemen : (1). Kelompok penghayat kepercayaan yang tergolong kepercayaan atau agama-agama lokal (suku), seperti kepercayaan Suku Dayak (kaharingan, manyaan), suku batak (parmalim, si Raja Batak), suku Badui, Sunda wiwitan, Buhun, (Jawa Barat), Wetu Telu (Lombok), Naurus (Pulau Seram, Maluku). (2). Kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang Masuk dalam kategori ini adalah penghayat kebatinan kejawen yang berpusat di Jawa antara lain Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Sumarah, Susilla Bidhi Dharma (Subud), Sapta Darma, Budi Luhur. (3). Kelompok penghayat kepercayaan yang berindikasikan keagamaan meliputi sekte keagamaan, yakni aliran keagamaan, pengelompokkan jemaah keagamaan seperti Ahmadiyah, Buda Jawi Wisnu, Hari Krisna dan lainnya. (4). Kelompok penghayat kepercayaan mistik atau klenik, seperti perdukunan, paranormal, peramalan, pengobatan, santet, tenung, sihir dan metafisik.[69]

---

[68] Ahmad Choirul Rofiq, *Kebijakan Pemerinrtah Terkait HakSipil Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya Terhadap Perakembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo*, Jurnal KodifikasiA, Vol. 8 No. 1 tahun 2014, 10.

[69] Oki Wahyu Budijanto, *Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepecayaan Di Kota Bandung*, Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dalam penelitian ini, kedua subjek penelitiannya masing-masing dari SMA 9 dan SMP 59 Surabaya hanya menganut Penghayat Kepercayaan Sapta Darma, maka peneliti akan menjelaskannya:

3.3. Penghayat Kepercayaan Sapta Darma

Kata Sapta Darma berasal dari bahasa Jawa kuno, "Sapta" artinya tujuh dan "Darma" artinya kewajiban. Jadi pengertian Sapta Darma adalah tujuh kewajiban suci. Adapun pengertian menurut istilah (terminologi) adalah nama dari salah satu organisasi penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang pokok ajarannya adalah melaksanakan tujuh kewajiban suci. Penerima ajaran Sapta Darmo adalah Hardjosapoero, seorang warga di Kampung Pandean, Desa Pare, Kabupaten Kediri yang berprofesi sebagai tukang cukur. Pada tanggal 26 Desember 1952, Hardjosapoero menerima wahyu yang pertama dan kemudian pada tanggal 12 Juli 1954 diterima wahyu yang mengajarkan Wewarah Tujuh. Aliran kepercayaan yang lahir di Kediri ini awalnya hanya tersebar di wilayah kabupaten Kediri itu sendiri dengan metode penyembuhan. Metoded menyembuhkan mayarakat inilah yang menjadi awal mula penyebaran ajaran Sapta Darma.[70]

Pusat ajaran Sapta Darma adalah di Yogyakarta (Sanggar Candi Sapta Rengga), sebagai kiblat dan pusat ibadah. Dengan adanya ketentuan

[70] Anonim, "Aliran kerohanian Sapta Darma", Blogkejawen.blogspot.com/2011/03/alirn-kerohanian-sapta-darma-.html?m=1, (Selasa, 9 April 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan yang tertera di Undang-undang No. 8 Tahun 1958 maka berdasarkan keputusan Sarasehan Agung Tuntunan Kerokhanian Sapta Darma pada tanggal 27 Desember 1986 dibentuklah wadah yang berguna untuk menghimpun serta membina warga Sapta Darma yang bernama Persaatuan Warga Sapta Darma (Persada).[71] Sapta Darma adalah murni dan bukan sempalan dari agama lain. Sapta darma juga sudah terdaftar resmi di Depdagri. Saat ini diperkirakan terapat kurang lebih empat juta warga Sapta Darma di seluruh Indonesia.[72]

Tujuh kewajiban Sapto Darmo itu disebut sebagai *Wewarah Suci* yang bisa dijelaskan sebagai berikut: *pertama,* Setia dan Tawakal kepada Pancasila Allah (lima sifat Allah yaitu; Allah Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Wasesa atau Kuasa dan Maha Langgeng atau Kekal). *Kedua,* Dengan jujur dan suci hati harus setia menjalankan Undang-undang Negara. *Ketiga,* Turut setia menyisingkan lengan baju menegakkan berdirinya Nusa dan Bangsanya. *Keempat,* Menolong kepada siapa saja, bila perlu tanpa pamrih melainkan berdasarkan cinta kasih. *Kelima,* Berani hidup berdasarkan kekuatan diri sendiri. *Keenam,* Sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan, halus susila beserta halusnya budi pekerti,

---

[71] Anonim, "Aliran kerohanian Sapta Darma", Blogkejawen.blogspot.com/2011/03/alirn-kerohanian-sapta-darma-.html?m=1, (Selasa, 9 April 2019, 06:56).

[72] Lukas Adi Prasetya, "Sapta Darma Bukan Aliran Sesat", Kompas, https://nasional.kompas.com/read//2008/10/14/20390080/sapta.darma.bukan.aliran.sesat , (Selasa, 9 April 2019, 06:52).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang selalu memberikan jalan yang mengandung jasa serta memuaskan. *Ketujuh*, adalah yakin bahwa dunia ini tiada abadi, melainkan selalu berubah-ubah.[73] Sapta darma sebagai salah satu aliran kepercayaan, mempunyai tujuan untuk membentuk kerohanian dan budi luhur, membina kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat (mengayu-ayu bagai bawana).[74]

4. Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional dan Lokal

4.1. Pengertian Kebijakan Nasional dan Lokal

Pembangunan sistem pendidikan nasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri dan modern.[75] Kebijkan dalam pembangunan pendidikan harus merupakan pondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya mengingat secara hakiki upaya pembanguan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak menjadi pelaku pembangunan di berbagai bidang lainnya.[76] Berikut adalah contoh kebijakan pendidikan nasional:

---

[73] Jarman Arroisi, *"Aliran Kepercayaan dan Kebatinan: Membaca Tradisi dan Budaya Sinkretisme Masyarakat Jawa",* AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 1, No. 1, 2015.

[74] Mutholib Ilyas, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, (Surabaya: CV AMIN Surabaya, 1988), 151.

[75] Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 158.

[76] Hashbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Inddonesia,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 116,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem pendidikan nasional dibangun dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 tahun 2003), Pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 menyebutkan bahwa[77]:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntuatan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponan pendidikan nyang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kemudian pada Bab II Dasar, Fungsi dan Tujuan menyebutkan bahwa:

Pasal 2 : Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3 : pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mebentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

4.2. Dasar Kebijakan Pendidikan Jawa Timur

Kebijakan Pendidikan Jawa Timur tertuang secara jelas dan resmi pada Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Perda tersebut ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 oleh Gubernur Jawa Timur saat itu Soekarwo.[78] Dasar-dasarnya yakni:

[77] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[78] Perda Jawa Timur No. 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pasal 3: penyelenggaraan pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Pasal 4: penyelenggaraan pendidikan di daerah bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah.

Kemudian, adanya poin penting dalam peraturan tersebut yakni pada pasal 10 poin a kewajiban pemerintah provinsi yaitu: "memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap peserta didik tanpa diskriminasi". Poin diskriminasi kemudian juga disebutkan pada pasal 12 poin c yang berbunyi : "menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminasi".Peserta didik dalam perda tersebut memiliki hak yang tercantum dalam pasal 13 c yakni : "memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."

Dengan dasar kebijakan diatas itu maka disusunlah rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Jawa Timur. Pada Renstra ini memuat visi, misi dan tujuan pendidikan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Visi Dinas Pendidikan Jawa Timur adalah[79]:

"Terwujudnya insan yang cerdas, berakhlak, professional, dan berbudaya".

[79] Rencana Strategis Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi Dinas Pendidikan Jawa Timur adalah:

"Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang"

Tujuan Dinas Pendidikan Jawa Timur adalah : meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan mutu pendidik, dan mewujudkan fasilitasi hasil karya cipta pendidikan tinggi.

5. Dasar Hukum Pendidikan Kepercayaan di Indonesia

Pendidikan agama, baik untuk dewasa ataupun untuk anak-anak adalah penting bagi para penganutnya. Pemerintah Negara Indonsia telah mengatur Undang-undang dan membuat pertauran mengenai hak pendidikan anak di Indonesia. Yang pertama yakni Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasioal pada bab V peserta didik pasal 12 nomer 1 a: Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: "Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."[80]

Undang-undang tentang pendidikan tersebut kemudian diperkuat dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang sudah diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia pada tanggal 30 September tahun 2005 dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri serta ditandatangani oleh Presiden saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.[81] Dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan

---

[80] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[81] Kementrian Luar Negeri, "Indonesia Meratifikasi Hak-hak sipil dan Politik dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-Meratifikasi-Kovenan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Politik tersebut dijelaskan mengenai hak pendidikan yang tertuang dalam bagian III pasal 18 yang berbunyi:

> "Negara pihak dalam kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri."[82]

Kemudian sesuai dalam Peraturan pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi :

> "Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan."[83]

Lebih jauh lagi, Indonesia telah menetapkan undang-undang yang mengakui adanya keberagaman dan kebebasan dalam beragama yang tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) mencerminkan nilai dasar ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk yang lebih rinci yaitu kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Sedangkan Landasan pendidikan Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuadayaan (selanjutnya disebut Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang

---

Hak-hak-Sipil-dan-Politik-dan-Kovenan-Hak-hak-Ekonomi-Sosial-dan-Buda.aspx, (Selasa, 06 November 2018, 19:55)

[82] Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Sipil dan Politik.

[83] Peraturan pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.[84] Pada Permendikbud yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2016 di Jakarta tersebut memuat 5 pasal yang keseluruuhanya dapat menjadi dasar atau awal dari proses pengajaran kepada anak penghayat kepercayaan di sekolah.[85] Pada pasal-pasal didalamnya juga menyebut bahwa mengingat kepada undang-undang dan peraturan sebelumnya yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan penganut penghayat kepercayaan yakni Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 77 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat.[86] Adapun Pedoman Implementasi yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Ketetapan tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pda tahun 2017.

Dalam pedoman yang berjumlah 101 halaman tersebut memuat berbagai hal terkait pendidikan mulai dari karakteristik layanan pendidikan kepercayaan, kompetensi inti, ruang lingkup, materi pembelajaran, model pembelajaran, hingga penilaian dan laporan hasil belajar peserta didik.[87]

---

[84] Permendikbud Indonesia Nomor 27 tahun 2016.

[85] Dian Jennie Tjahjawati, *Wawancara*, Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya, 24 Februari 2019.

[86] Permendikbud Indonesia Nomor 27 tahun 2016.

[87] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan*, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jendaral Kebudayaan, , 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar hukum Peraturan Daerah Jawa Timur mengenai pendidikan penghayat yang tercantum dalam pasal 44 poin 5 yang berbunyi :"Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi krida, karya ilmiah, latihan olah bakat atau olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.[88]

[88] Perda Jawa Timur No. 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran.[89] Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Penelitian kualitatif memperhatikan proses, peristiwa dan otentitas.[90] Peneliti yang menggunakan metode ini biasanya terlibat dalam interaksi realitas yang ditelitinya.

Peneliti yang melakukan penelitian dengan metode kualitatif biasanya berorientasi pada teori yang sudah ada. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi dengan pengertian: suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.[91] Dalam uraian tentang dasar teoritis tersebut, Bogdan dan Biklen (1982:30) menggunakan istilah paradigma. Paradigma diartikan sebagai kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep, atau proposisi yang

---

[89] Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 49.

[90] Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Makara, Vol. 9, No. 2, Desember 2005 dalam http://hubsasia.ui.ac.id/old/index.php/hubsasia/article/view/122/110, (4/11/2018).

[91] Moloeng, *Metodologi Penelitian*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian. Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-variabel yang tunggal melainkan dapat mengungkap hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya.[92]

Penelitian kualitatif bermaksud untuk mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan, serta tujuannya yaitu memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam.

Selain itu, penelitian kualitatif menggunakan paradigma alamiah. Artinya penelitian ini mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang terkait sama lain. Karena itu, meneurut paradigma alamiah setiap fenomena sosial harus diungkap secara holistik.[93] Keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditekankan. Karena itu, kriteria kualitas lebih ditekankan pada relevansi, yakni signifikansi dan kepekaan individu terhadap lingkungan sebagaimana adanya.

2. Sumber Data dan Data Penelitian

Secara umum sumber data penelitian kualitatif ialah tindakan dan perkataan manusia dalam suatu latar yang bersiafat alamiah. Sumber data lain adalah bahan-bahan pustaka seperti: dokumen, arsip, Koran, majalah, jurnal, ilmiah, buku, laporan tahunan, dan lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan

---

[92] M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 58.

[93] Ibid., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data dalam penelitian kualitatif ialah wawancara mendalam, riset parsitipatif, pengamatan, dan studi pustaka. Prinsipnya, teknik-teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena sosial secara ilmiah.[94]

Terkait dengan pencarian data di lapangan, seorang peneliti kualitatif dituntut untuk secara jeli mengumpulkan data-data yang ada. Seumber data yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan. Data ini dapat diperoleh dari subjek atau informan di lapangan tempat penelitian, bisa berupa wawancara yang berkompeten. Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah dari tenaga pengajar dan murid penghayat kepercayaan di sekolah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, serta pihak sekolah terkait seperti pihak kurikulum maupun wali kelas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan. Sumber dari bacaan disebut sumber sekunder. Sumber data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat pribadi, kitab harian, notula rapat perumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi

[94] M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah, dan lain sebagainya.[95] Dalam penelitian ini data sekundernya adalah proses kegiatan belajar mengajar kelas penghayat kepercayaan dan temuan lainnya yang berada di lapangan.

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini antara lain :

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Observasi diperlukan untuk melengkapi keterangan tentang masalah yang sedang diteliti, jadi bisa berfungsi sebagai eksplorasi.dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulasikannya.[96] Dalam penelitian ini, observasi akan dilakukan dengan mengamati proses belajar mengajar dan lingkungan sekolah tempat dilakukannya praktek belajar mengajar pada siswa penganut kepercayaan. Peneliti terlibat juga dalam kegiatan kelas penghayat kepercayaan di kedua sekolah.

b. Wawancara

Wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi dari

[95] Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi AKsara, 2009), 106.

[96] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narasumber. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.komunikasi ini dapat dilakukan dalam keadaaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juaga dilaksanakan melalui telepon.[97]

Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya yakni wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses terjadinya pendidikan penghayat kepercayaan kepercayaan di SMA 9 dan SMP 59 Surabaya. Selain itu, rekam jejak berlangsungnya pendidikan seperti bukti perijinan dan kebijakan milik sekolah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpulan data karena sebagian besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.[98] Dokumentasi dalam penelitian ini akan digunakan sebagai patokan dan bukti untuk memperkuat penelitian. Dokumentasi bisa berupa proses terjadinya belajar mengajar mata pelajaran kepercayaan, rekaman dengan narasumber, atau peraturan kebijakan sekolah pada SMA 9 dan SMP 59 Surabaya mengenai mata pelajaran tersebut.

---

[97] Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi AKsara, 2009),113.

[98] Burhan Bungin, *Penelitian Kualtatif Edisi Kedua*, (Penada Media Group, 2011), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisis Data

Metode analisa data adalah upaya untuk mencari dan memperbaiki secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ditujukan untuk meingkatkan pemahaman peneliti mengenai permasalahan yang diteliti.[99] Biasanya data dianalisa secara deskriptif yang sebagian besar berasal dari wawancara dan catatan pengamatan; catatan dianalisis untuk memperoleh tema dan pola-pola yang dideskripsikan dan diilustrasikan dengan contoh-contoh, termasuk kutipan-kutipan dan rangkuman dokumen, koding data dan analisis verbal.[100] Kemudian peneliti dapat melakukan triangulasi data untuk memperkuat analisa yang dimilikinya. Dalam penelitian ini karena membahas mengenai kebijakan, praktek, evaluasi dan juga kondisi sosial dalam pelaksanaan pengajaran maka akan digunakan analisa teks, bahasa dan konteks lapangan. Analisa teks dan bahasa adalah alat analisa yang bertujuan mengungkapkan proses etik dan emik yang terkandung di dalam teks dan bahasa itu, baik dalam konteks objek, subjek maupun wacana yang berlangsung di dalam proses tersebut.[101]

Beberapa kriteria sementara untuk memilih beberapa objek analisa penelitian mendalam yakni : (1) Saran Informan, (2) Ketertarikan Secara Teoritis, (3) Strategi Etnografi, (4) Mengorganisir Pilihan, (5) Mencari bagian dari budaya, hubungan antar budaya, hubungan budaya dengan kesluruhan sistem. Ada

---

[99] Noeng Muhadjir, *Mtodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

[100] Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 36.

[101] Burhan Bungin, *Penelitian Kualtatif Edisi Kedua,* (Penada Media Group, 2011), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti untuk dapat melakukan analisa taksonomi, yaitu : 1. Menentukan domain untuk analisis taksonomi. 2. Identifikasi pengganti kerangka yang tepat untuk analisa.[102] 3. Mencari kemungkinan lain yang mungkin ada diantara subjek yang ada. 4. Mencari domain inklusif yang lebih besar yang memiliki kemungkinan termasuk dalam domain yang dianalisa. 5. Menyusun taksonomi sementara. 6. Formulasikan pertanyaan struktural untuk memferivikasikan hubungan taksonomi dan memasukkan kondisi yang terbaru. 7. Mengadakan interview terstruktur tambahan. 8. Menyusun taksonomi yang lengkap.

[102] James P. Spradley, *The Etnographic Interview*, (Amerika: Harcourt Brace Jovanovich College Publisher, 1979), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa domain dan taksonomi, Analisa domain dalam penelitian ini yakni:

No.	Rincian Domain	Hubungan Semantik	Domain
1.	Agama Penghayat Kepercayaan	jenis dari	Keyakinan masyarakat yang sudah diresmikan
1.	Murid Guru	pelaku dari	Tokoh dalam proses belajar mengajar
2.	Sekolah Sanggar Rumah	Lokasi dari	Proses belajar mengajar
3.	Ruang kelas Ruang tamu Perpustakaan	Lokasi dari	Tempat berlangsungnya proses belajar mengajar
4.	Perwalian Melaksanakan pembelajaran Ujian	Urutan dalam	Administrasi sekolah
5.	Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Kovenan Sipol	Sebagai landasan dasar dari	Praktek mengajar di sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis taksonomi dalam penelitian ini yakni :

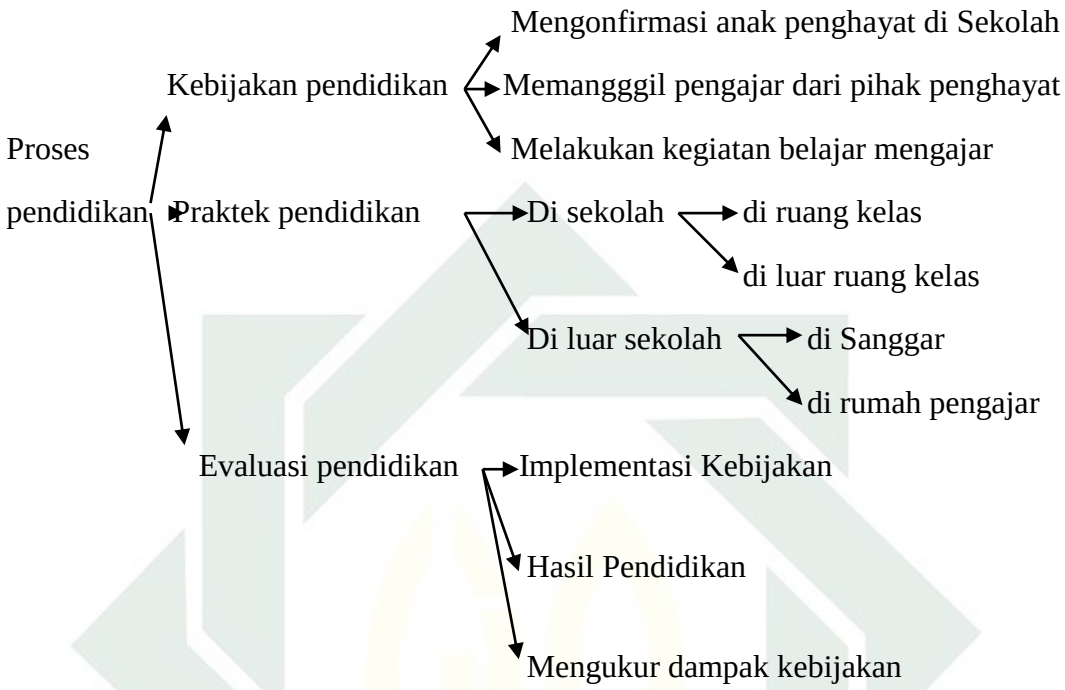

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Profil Lokasi

1. SMA 9 Surabaya

Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak sekolah menengah atas komplek yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma No. 48, Ketabang, Genteng, Surabaya. SMAN 9 termasuk dalam sekolah komplek favorit bersama dengan SMAN 1, SMAN 2, dan SMAN 5 Surabaya. Sekolah ini sekarang dipimpin oleh Drs. H. M. Shadeli, MM. Pd. Sebagai kepala sekolah.[103] Sekolah ini berada di provinsi Jawa Timur dan berada di pusat kota Surabaya yang menjadi ibukota provinsi Jawa Timur tersebut.

SMA 9 sudah memiliki izin operasional dan berdiri sejak tanggal 30 Januari 1976 dengan status kepemilikian pemerintah daerah. Seperti pada sekolah menengah atas umumnya, sekolah ini melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari dan sekolah ini sudah berakreditasi A. sekolah ini memiliki luas tanah seluas 8.308 m² dan memiliki 28 ruang kelas, 6 ruang lab, serta 1 ruang perpustakaan.

[103] Kementerian Penbdidikan dan Kebudayaan, Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah SMAN 9 Surabaya, diakses dari http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/C7901035D043191BF563, diakses tanggal 24 Februari 2019 jam 09:48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selayaknya sekolah umum yang lainnya, SMA 9 mengadakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari yakni dari jam 07:00 WIB sampai dengan sore jam 15:00 WIB. Sekolah ini juga memiliki murid dengan agama yang berbeda-beda, seperti Kriten, Katolik, Hindu dan Penghayat Kepercayaan.[104] Kemudian sekolah juga mengajarkan tentang agama sesuai dengan pemeluknya, semisal untuk Islam bisa salat pada waktu dan tempatnya, Kristen dan Katolik bisa berdoa bersama begitupun juga untuk Hindu dan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma.[105]

Sekolah ini pernah memiliki sejarah kelam bersama dengan SMAN komplek yang ada di sekitarnya. Dulu, sering terjadi tawuran antar SMAN komplek sekitar yang terjadi karena banyak alasan, salah satu alasan yang paling umum adalah supporter tim tiap sekolah yang bergesekan satu sama lain. Demi meredam emosi para siswa SMAN yang tidak stabil dan mencegah kejadian yang mungkin bisa terjadi di masa depan nanti, akhirnya pihak SMAN 9 bersama dengan SMAN lain yang satu komplek (SMAN 2, SMAN 5, SMAN 1 Surabaya) membuat piagam perjanjian untuk tidak membiarkan murid-muridnya melakukan perkelahian atau tawuran antar sekolah.[106]

---

[104] Kardiono, *Wawancara,* Jln Wijaya Kusuma No. 48 Surabaya, 5 Maret 2019.

[105] Habib, *Wawancara,* Jln Wijaya Kusuma No. 48 Surabaya, 5 Maret 2019.

[106] Habib, *Wawancara,* Jln Wijaya Kusuma No. 48 Surabaya, 5 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. SMP 59 Surabaya

Sekolah Menengah Pertama Negeri 59 Surabaya terletak di Jalan Klumprik PDAM, Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Sekolah ini berada di ibukota provinsi Jawa Timur yakni di Surabaya. Dari segi usia, sekolah ini masih tergolong muda karena baru baru resmi berdiri pada tanggal 15 Juni 2016 dan baru memiliki izin operasional pada tanggal 16 Juni 2016.[107]

SMP 59 Surabaya sekarang dipimpin oleh Nur Diana Dewi, S.Pd sebagai Kepala Sekolah. Seperti pada umumnya, sekolah ini melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari senin hingga minggu. Pada hari senin hingga jum'at pembelajaran dimulai pada pagi hari yakni pukul 06:30 WIB sampai dengan 15:30 WIB, sedangkan pada hari sabtu ada kegiatan pramuka yang wajib diikuti oleh setiap murid yakni mulai pukul 07:00 WIB hingga pukul 09:00 WIB. Sekolah ini menggunakan kurikulum KTSP. Adapun luas tanah yang dimiliki oleh SMPN 59 adalah 6770 m² dan memiliki 4000 m² luas bangunan.[108]

Sekolah ini baru saja berdiri tahu 2016, akan tetapi sudah memiliki banyak kemajuan dan perubahan dari segi sarana dan prasarana. Sepertti memiliki 14 ruang kelas yang perinciannya yakni 6 kelas yang digunakan kelas VII, 6 kelas yang digunakan untuk kelas VIII, dan 2 kelas yang

[107] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah SMPN 59 Surabaya, diakses dari http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/4FED487F26A3A7B66FE2, diakses tanggal 24 Februari 2019 jam 09:51.

[108] Hana Muftakhurini, *Wawancara*, Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 28 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk kelas IX. Jumlah kelas IX berbeda dengan kelas lain dibawahnya karena baru dibuka pada 2016 dan sebagai kali pertamanya akan ada lulusan dari SMPN 59. Pihak sekolah telah menyiapkan beberapa kelas baru yang nantinya akan bisa digunakan oleh angkatan selanjutnya yang akan naik kelas menuju kelas IX.

Fasilitas yang dimiliki sekolah ini yaitu 14 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 laboratorium IPA, 1 laboratorium IPS, 1 laboratorium computer, 1 laboratorium keterampilan, 1 laboratorium seni dan musik, 1 musholla, dan lapangan. Tenaga pengajar atau guru yang dimiliki oleh SMP 59 adalah sebanyak 24 orang yang terdiri dari 15 orang PNS, dan 9 orang *outsourching.* Jumlah siswa sekolah ini yakni 303 siswa laki-laki dan 205 siswi perempuan. Siswa dan siswi sekolah ini juga terdiri dari agama yang berbeda, didominasi oleh agama Islam, kemudian Kristen dan Katolik, serta Hindu dan kemudian penghayat kepercayaan Sapta Darma.[109]

SMP 59 meskipun termasuk dalam sekolah umum, akan tetapi bisa dibilang cukup agamis dalam perjalanan praktek belajar mengajar yang ada. Hal ini bisa dilihat dari slogan yang ada pada banner yang dipasang pada bagian depan sekolah yang berbunyi ASMAT, kepanjangannya yakni Assalamualaikum, Minta Tolong, dan Terima Kasih. Kemudian pada dinding dan pillar bagian dalam gedung sekolah ditempelkan oleh pihak sekolah stiker yang bertuliskan 99 Asmaul Husna[110] dan tersebar di seluruh sekolah.

[109] Hernowo, *Wawancara,* Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 28 Februari 2019.

[110] Asmaul husna adalah 99 nama baik Allah (Tuhan) dalam agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan keagamaan juga menjadi rutinitas yang biasa dilakukan. Kegiatan tersebut seperti salat Dhuha berjamaah yang dilakukan setiap hari selasa hingga kamis yang dilakukan saat jam pertama pembelajaran dan dilakukan secara bergantian (tidak bersamaan satu sekolah). Pola pergantian ini yaitu misal selasa kelas VII dan VIII shalat dhuha, Rabu kelas VIII dan IX. Pola ini dilakukan karena tidak cukupnya ruangan musholla untuk menampung seluruh murid yang ada disekolah ini. Sedangkan murid yang beragama lain dapat melakukan kegiatan kegamaan berupa berdoa yang biasanya dilakukan bersama di perpustakan atau di ruang kelas.[111]

Kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan lainnya adalah salat wajib berjamaah (dhuhur dan ashar) yang dilakukan berjamaah. Kegiatan keagamaan ini dilakukan berdasarkan inisiatif dari pihak sekolah yang merasa bahwa waktu kosong sebaiknya di isi dengan kegiatan positif yang bisa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa-siswi. Selain itu juga, salat ashar dilakukan untuk menghindari konflik yang mungkin dan atau bisa saja terjadi antara siswa SMPN 59 dengan SMPN 34 Surabaya yang tempatnya tidak terlalu jauh. Hal ini dikarenakan pernah terjadi insiden perkelahian antara siswa dari kedua sekolah, sehingga pihak sekolah sengaja memulangkan siswa dengan sedikit lebih sore karena tidak ingin siswa-siswi mereka berpapasan dengan siswa sekolah lainnya.[112]

---

[111] Hernowo, *Wawancara*, Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 28 Februari 2019.

[112] Dondong, *Wawancara*, Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 28 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Profil Siswa Penganut Penghayat Kepercayaan

1. Nanda Meg Ryan P. S.

Nanda merupakan salah satu dari sekian banyak anak yang termasuk dalam kelas XI IPA 1. Nanda bertempat tinggal serumah dengan orang tuanya, yakni di daerah Tandes Surabaya. Nanda terlahir pada tanggal 17 Februari 2002. Nanda adalah anak ke tiga dari lima bersaudara. Nanda termasuk kalem yang dilahirkan dari keluarga yang memiliki keyakinan sama yakni Sapta Darma.[113] Nanda termasuk dalam kelas XI IPA 1, kelas yang terdiri dari anak-anak yang bisa dibilang paling pintar dari satu angkatannya. Kelas ini selalu diawasi dan dikontrol oleh wali kelasnya, apabila sesuatu hal buruk terjadi dan berkaitan dengan siswa dari kelas ini, maka wali kelas akan bertindak dan bila perlu akan memanggil wali murid. Dalam sekolah, anak tersebut tidak pernah memiliki masalah dan tidak pernah ada isu terdengar yang berkaitan dengan status Nanda sebagai penganut penghayat kepercayaa di sekolahnya.[114]

2. Bangkit Mulya Sari

Bangkit Mulya Sari atau yang biasa dipanggil Mulya adalah murid dari SMP 59 Surabaya. Dia adalah salah satu dari murid-murid dari kelas VII A. Mulya lahir pada tahun 19 Mei 2005. Mulya adalah anak dari kedua orang tua yang juga menganut ajaran penghayat kepercayaan Sapta Darma. Karena dilahirkan dari kedua orang tua yang demikian itulah, maka Mulya menganut

---

[113] Nanda Ryan Meg, *Wawancara*, Jl. Wijaya Kusuma No. 48 Surabaya, 22 Februari 2019.

[114] Poerbo, *Wawancara*, Jl. Wijaya Kusuma No. 48, Surabaya, 27 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sapta Darma juga. Mulya tinggal bersama keluarganya di daerah Jalan Prada Indah No. 31 Kota Surabaya. Mulya adalah anak ke enam dari tujuh bersaudara yang semuanya juga adalah penganut Sapta Darma sepertinya.[115] Disekolah, Bangkit adalah termasuk anak yang pendiam, baik dan jujur serta akrab dengan teman-temannya. Anak tersebut tidak pernah memiliki masalah dan tidak ada berita atau masalah terkait dengan statusnya sebagai penganut penghayat kepercayaan dengan teman-temannya.[116] Bangkit sering berkumpul dengan anak-anak Nasrani.[117]

C. Sejarah Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di Sekolah

Ada berbagai organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia, sejak diresmikannya peraturan penulisan penghayat kepercayan pada kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP), pemerintah kemudian memenuhi hak pendidikan anak penghayat kepercayaan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebuadayaan No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan, maka pihak penghayat mengadakan rekrutmen.[118] Menurut Dian Jennie, “Kami mengajarnya sesuai

[115] Bangkit Mulya Sari, *Wawancara*, Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya, 24 Februari 2019.

[116] Fitria Isni Amaliyah, *Wawancara*, Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 25 Maret 2019.

[117] Nur Diana Dewi, *Wawancara*, Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 25 Maret 2019.

[118] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Rapor Manual Bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan Terhadap uhan Yang Maha Esa*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sertifikasi yang keluar dari Direktorat Penghayat Kepercayaan.kebetulan yang Surabaya itu ada dua pengajar yang mendapatkan sertifikasi".[119]

Direktorat Penghayat Kepercayaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka uji kompetensi pengajar dan diklat selama satu minggu di Jakarta guna memberikan sertifikasi mengajar pada penganut penghayat kepercayaan yang sanggup menjadi tenaga pengajar. Pada tahun 2017, Menyusul dari Permendikbud, maka diadakan uji kompetensi untuk pengajar. RPP dan RPS untuk kurikulum penghayat kepercayaan sudah dibuat dan dirumuskan dari Direktorat penghayat Kepercayaan yang bersifat universal untuk semua penghayat kepercayaan.[120]

Ketika sudah ada aturan Permendikbud kemudian disosialisasikan di sekolah, kemudian setiap organisasi mengumumkan kepada para penganutnya, bagi para penganut yang masih duduk di bangku sekolah atau memiliki anak yang masih bersekolah, akan diurus regulasi dan administrasi pendidikannnya sesuai dengan kepercayaannya baik dari pihak sekolah dan kemudian wali murid tersebut akan menghubungi pengurus pengahayat dan kemudian diurus perizinannya.

> Pada tahun 2018 bulan Juli kalau gak salah, di hotel Utami itu dilaksanakan semacam penyuluhan atau seminar dari pihak peghayat tentang pengajaran penghayat di sekolah yang sudah diresmikan pemerintah itu tadi. Itu dilakukan ke semua sekolah Surabaya, jadi kalau punya murid penghayat sekolah wajib melayani.[121]

---

[119] Dian Jennie Tjahjawati, *Wawancara*, Jl. Wijaya Kusuma No. 48 Surabaya, 22 Februari 2019.

[120] Dian Jennie Tjahjawati, *Wawancara*, Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya, 24 Februari 2019.

[121] Nur Diana Dewi, *Wawancara*, Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 25 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dian Jennie selaku pengajar penghayat kepercayaan di kedua sekolah tersebut menyebutkan bahwa: Iya memang ada, di SMAN 9 dan SMPN 59 Surabaya. Di SMAN 9 sudah sejak tahun 2017 dan di SMP 59 sejak 2018.[122] Pada SMA 9 dimulai pada tahun 2017 sedangkan pada SMP 59 dimulai pada tahun 2018. Kedua anak tersebut sama-sama dimulai pada saat kedua anak tersebut pertama masuk ke sekolah tersebut.

Berikut adalah proses pelegalan kelas penghayat kepercayaan pada kedua sekolah tersebut:

1. **SMA 9 Surabaya**

   Kelas ini berawal sejak masuknya Nanda ke SMA 9 pada tahun 2017. Berawal ketika orang tua Nanda yang memutuskan untuk tidak menyembunyikan identitas. Hal ini didasari karena dahulu saat Permendikbud no. 27 tahun 2016 belum keluar, dalam rapot anak tersebut tercantum sebagai penganut agama Islam.[123] Orang tua dari anak tersebut mengatakan kepada pihak sekolah bahwa anaknya adalah seorang penghayat kepercayaan, maka pihak sekolah dan orang tua mengurus administrasi guna menindak lanjuti kebutuhan edukasi kepercayaan sesuai dengan keyakinan Nanda.[124] Administrasi itu diurus dengan membuat surat pernyataan kepada pihak

---

[122] Dian Jennie Tjahjawati, *Wawancara,* Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya, 29 Oktober 2018.

[123] M. Shadeli, *Wawancara,* Jl. Wijaya Kusuma No. 48 Surabaya, 27 Maret 2019.

[124] Kardiono, *Wawancara,* Jln Wijaya Kusuma No. 48, Surabaya, 5 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah bahwa anak tersebut adalah seorang penghayat kepercayaan Sapta Darma dan disertai dengan pihak sekolah yang menghubungi Majelis Penghayat di cabang Surabaya.

> Kita yang mengontak. Kan tidak sembarang guru. Kalau amanat Permendikbud gurunya kan harus dari Majelis Penghayat, yang jelas kita telepon, perkumpulannya itu resmi, tidak boleh asal comot. Kita mengambil guru yang benar-benar legal secara undang-undang. Akhirnya bu Dian Jennie yang sanggup dan akhirnya kesini.[125]

Pihak sekolah mendapatkan guru atau pengajar penghayat kepercayaan dari orang tua murid yang sudah memiliki relasi dengan pengajar yang sudah disiapkan dari pihak Penghayat sendri.[126]

2. SMP 59 Surabaya

Pengajaran penghayat kepercayaan Sapta Darma pada SMP 59 dimulai sejak masuknya Bangkit Mulya Sari di sekolah menengah pertama tersebut pada tahun 2018. Pada saat anak tersebut masuk, kemudian diketahuilah bahwa anak tersebut adalah seorang penganut Sapta Darma. Meskipun pada rapornya, saat berada di bangku Sekolah Dasar (SD), Bangkit terasuk dalam agama Islam, bahkan pihak sekolah menyatakan bahwa anak tersebut sanggup mengaji.[127] Kemudian pihak sekolah berkoordniasi dengan wali murid Bangkit Mulya Sari agar dapat mencarikan pengajar dari pihak penghayat. Menurut Hernowo, “kami memanggil orang tuanya, menanyakan apa ada gurunya. Kemudian ada dan Orang tuanya memanggilkan guru penghayat

---

[125] Kardiono, *Wawancara,* Jln Wijaya Kusuma No. 48Surabaya, 5 Maret 2019.

[126] M. Shadeli, *Wawancara,* Jl. Wijaya Kusuma No. 48, Surabaya, 27 Maret 2019.

[127] Nur Diana Dewi, *Wawancara,* Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 25 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seniri. Lalu bu Dian itu datang. Gurunya itu gak punya ijazah, cuma punya sertifikat. Kami mengnggap itu bukan guru".[128]

Pengajar yang sanggup adalah Dian Jennie Tjahjawati, dan pengajar tersebut meminta untuk melakukan kegiatan belajar mengajar pada tempat lain karena murid yang ada di SMPN 59 hanya satu orang dan tidak adanya biaya transportasi yang diberikan oleh sekolah.[129]

D. Kebijakan Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan

1. SMA 9 Surabaya

SMA 9 Surabaya sebagai sekolah negeri yang terikat dan dijalankan langsung berdasarkan perintah dan amanat dari pemerintah, tidak memiliki kebijakan khusus atau tertulis terkait dengan pengadaan pembelajaran kelas penghyat kepercayaan di sekolah.

> Enggak, kita cuma menyipaki saja, gak usah terlalu berlebihan. Dia nanti repot, kalau ada perhatian khusus. Sudah kita sikapi saja, yang penting jalan saja. Ada peraturan dari pemerintah itu kita terapkan kita ikuti kita fasilitasi. Gitu saja. Itu namanya keyakinan. Kita mungkin tidak sejalan dengan itu, saya pun tidak sejalan tapi kan kita fasilitasi namanya pendidikan. Sesuai keyakinan masing-masing. Kita mewadahi saja. Sudah diatur undang-undang oleh negara.[130]

Hal ini didasarkan karena pihak sekolah yang tidak ingin memberikan beban ataupun terkesan mengkhususkan pendidikan penghayat yang ada disekolahnya. Selain itu juga, pihak sekolah mengikuti sepenuhnya

---

[128] Hernowo, *Wawancara*, Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 28 Februari 2019.

[129] Dian Jennie Tjahjawati, *Wawancara*, Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya, 24 Februari 2019.

[130] M. Shadeli, *Wawancara*, Jl. Wijaya Kusuma No. 48 Surabaya, 27 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan yang turun dari atasan (Pemerintah serta Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) yang memiliki kekuatan berdasarkan hukum.

> Sebelumnya kan sulit diakui, dari zaman menterinya masih Anies Baswedan, langsung di legalkan prosesnya diseluruh Indonesia. Kemudian tidak ada satupun sekolah yang berani menolak. Kalau dulu mungkin menolak karena kebijakannya belum ada, karena agama yang diakui kan enam termasuk, penghayat kan belum, maka sekolah mungkin muridnya ada yang dimasukkan di agama lain, karena pelajarannya belum ada. Dengan turunnya itu buat saya malah enak, karena kebijakan hukumnya kan kuat, sekolah melakukan juga enak. 2017 pada tahun ajaran baru sudah bisa dilaksanakan.[131]

Sekolah hanya menjalankan kewajiban dan memfasilitasi kebutuhan anak yang menjadi perintah dan amanat yang ada dalam Undang-Undang, Surat Keputusan, maupun Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sekolah hanya memberikan hak murid dengan menyikapi peraturan yang ada, menerapkannya secara hati-hati agar tidak membebani wali murid, siswa dan pengajar penghayat tersebut.

2. SMP 59 Surabaya

Terkait dengan Kebijakan kelas penghayat kepercayaan di SMP 59 Surabaya, pihak sekolah tidak memiliki dan atau membuat kebijakan tersendiri yang berkaitan dengan kelas penghayat tersebut.

> Kebijakan itu kan dari dinas, dinas mengakui adanya anaknya itu. Pas ditanyai penghayat kepercayaan karena apa karena sudah diakui yang penghayat kepercayaan. Terus tidak berapa lama didatangi ibu itu tadi, Dian Jennie dan mengaku sebagai pengajar dan kita tidak sampai jauh ke RPPnya mana. Gak sampai segitu, jadi kita, saya sendiri tidak memiliki gitu lho. Kebijakan itu hanya diterima dari dinas saja bahwa anak itu yang agamanya selain Islam dan Kristen, jadi mendalam mengenai administrasi.[132]

---

[131] Kardiono, *Wawancara,* Jln Wijaya Kusuma No. 48, Surabaya, 5 Maret 2019.

[132] Hernowo, *Wawancara,* Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 3 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak sekolah menjelaskan bahwa setelah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 tahun 2016, pihak penghayat kemudian mengikuti sosialisasi terkait pelegalan kelas penghayat untuk daerah Surabaya yang dilakukan oleh pihak penghayat kepercayaan yang meminta kepada seluruh sekolah di Surabaya agar jika memiliki murid seorang penghayat kepercayaan maka segera dapat berkoordinasi dengan pihak Majelis Penghayat yang ada di Surabaya untuk dapat berkoordinasi dengan sekolah dan wali murid yang terkait untuk dapat mengurus pengajaran sesuai kepercayaan tersebut. Jadi, pihak sekolah tidak memiliki kebijakan atau peraturan tertulis terkait kelas penghayat tersebut.[133]

E. Praktek Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan

1. SMA 9 Surabaya

Proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar kelas penghayat kepercayaan pada SMA 9 Surabaya diadakan pada setiap hari jum'at. Kurikulum sekolah memberikan waktu untuk kelas agama sebanyak 3 kali pertemuan dalam seminggu, satu kali pertemuan selama 45 menit.

> Akhirnya bu Dian Jennie yang sanggup dan akhirnya kesini. Ngajarnya beliau itu kan gak mungkin setiap hari. Karena mungkin mengajar juga di tempat lain. Dia keliling. Kami menyediakan disini hari jum'at. Mulai dari anak jum'atan sampai sore. Pas ketika anak jum'atan beliau mengajar di perpustakaan, dikasih waktu disitu, face to face seperti prifat karena Cuma satu anak. Jadi sampai jam tiga atau jam berapa gitu. Karena memang durasinya pelajarn agama itu 3 jam pelajaran dalam satu minggu. Jadinya satu jam itu 45 menit waktu pelajaran. Kadang bu Jenni jam 11 sudah datang. Kalau untuk kepercayaan memang khusus jum'at.[134]

[133] Nur Diana Dewi, *Wawancara*, Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 25 Maret 2019.

[134] Kardiono, *Wawancara*, Jln Wijaya Kusuma No. 48, Surabaya, 5 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelas ini dimulai pada jam 11:45 WIB dan berlangsung selama 45 menit yakni sampai pukul 12:30 WIB. Kelas ini dilakukan pada ruangan perpustakaan atau di laboratorium sekolah.[135] Pada pembelajaran kelas ini, peneliti melihat bahwa pengajar menggunakan metode konvensional dan metode inquiry. Metode ini terlihat dari bagaimana pengajar yang menjelaskan secara lugas mengenai doktrin dan ajaran kepercayaan mereka dan siswa disini hanya menulis. Inquiry dapat dikatakan demikian karena setiap kali akan memulai dan selesai belajar, siswa akan ditanya dan diminta untuk menjelaskan kembali apa yang telah didapatnya.

Alasan kenapa sekolah tidak memberikan kelas adalah karena hanya ada satu murid saja. Pengajaran biasanya dilakukan secara empat mata atau tatap muka antar murid dan pengajar didalam perpustakaan secara pasti, dalam arti selama ada kursi dan tempat yang dirasa nyaman, maka disitulah pembelajaran berlangsung. Pembelajaran ini biasanya juga berlangsung bersamaan dengan kelas agama Kristen dan Protestan yang juga berlokasi ditempat yang sama yaitu di dalam perpustakaan. Ketika ujian, pihak sekolah berkoordinasi dengan Dian Jennie untuk membuat soal dan kemudian menyetorkannya kepada Ira selaku Waka Kurikulum 2 SMA 9 untuk mengurus soalnya dan menguploadnya agar bisa dikerjakan oleh siswa saat ujian.[136]

---

[135] M. Shadeli, *Wawancara*, Jl. Wijaya Kusuma No. 48, Surabaya, 27 Maret 2019.

[136] Dian Jennie Tjahjawati, *Wawancara*, Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya, 24 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. SMP 59 Surabaya

Pengajaran pada SMP 59 adalah jenis praktek yang dilakukan tidak pada sekolah, atau di luar sekolah. Kelas ini dihadiri oleh satu orang murid yakni Bangkit Mulya Sari sendiri sebagai murid dengan Dian Jennie sebagai pengajarnya.[137] Menurut Nur Diana, "Kelasnya itu di luar sekolah mas. Dimana gitu kami kurang tahu kalau tidak salah mereka bilang di tempat ibadahnya, dikumpulkan bersama-sama".[138]

Disini kelas dilaksanakan pada rumah Dian Jennie yang beralamat di Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya pada hari yang telah ditentukan sesuai perjanjian antara Dian Jennie selaku pengajar dengan Bangkit Mulya Sari, contohnya yakni pada hari Minggu pagi. Akan tetapi, jadwal tersebut bisa berubah mengikuti kesanggupan Dian Jennie selaku pengajar karena beliau tidak hanya berprofesi sebagai pengajar saja dan memiliki kesibukan lainnya. Jadi semisal kelas yang biasanya dilaksanakan minggu pagi pukul 08:00 WIB, bisa berganti pada sore hari pukul 16:00 WIB tergantung pada perjanjian dan kesanggupan kedua pihak.

Metode pembelajaran yang dilakukan pada kelas ini adalah metode konvensional, inquiry dan resitasi. Konvensional karena peneliti melihat bahwa murid tersebut mendengarkan apa saja yang diajarkan dan dijelaskan oleh pengajar. Selain itu murid juga disuruh menjelaskan kembali apa yang telah didapatkannya pada pelajaran hari sebelumnya dan pada hari itu yang

[137] Bangkit Mulya Sari, *Wawancara,* Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya, 24 Februari 2019.

[138] Nur Diana Dewi, *Wawancara,* Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 25 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa ini adalah metode inquiry. Serta siswa disuruh membuat rangkuman tentang ilmua yang telah didapatkan dengan ditulis pada buku tulis yang mengindikasikan bahwa ini adalah metode resitasi.

Pihak sekolah memperbolehkan dan menyediakan tempat mengajar untuk Dian Jennie selaku pengajar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akan tetapi, Dian Jennie selaku pengajar memilih untuk melakukan kegiatan tersebut di rumahnya. Alasan kenapa Dian Jennie selaku pengajar memilih untuk melakukan pengajaran di rumahnya adalah karena tidak adanya uang transport dari pihak sekolah. Hal ini berbeda dengan SMA 9 Surabaya yang memberikannya uang transport untuk mengajar.[139] Selain itu, menurut yang peneliti tangkap dari wawancara, karena yang dimiliki pengajar penghayat adalah sertifikasi mengajar dan bukan ijazah, pihak sekolah meragukan penguasaan atau keahlian dalam pengajaran kelas tersebut. "Kami memanggil orang tuanya, menanyakan apa ada gurunya. Kemudian ada dan Orang tuanya memanggilkan guru penghayat seniri. Lalu bu Dian itu datang. Gurunya itu gak punya ijazah, Cuma punya sertifikat. Kami mengnggap itu bukan guru".[140] Pengajaran berdurasi 60 menit pada setiap pertemuan.

[139] Dian Jennie Tjahjawati, *Wawancara*, Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya, 24 Februari 2019.

[140] Nur Diana Dewi, *Wawancara*, Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 25 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Evaluasi Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan

1. SMA 9 Surabaya

Evaluasi pengajaran kelas penganut penghayat kepercayaan dilakukan pada setiap akhir semester yang dilakukan dengan penilaian siswa serta pengumpulan nilai. Seusai nilai ujian akhir siswa didapat, kemudian diserahkan kepada Wali Kelas untuk kemudian dimasukkan pada rapor siswa.[141] Kelas yang dilakukan di perpustakaan terkadang bisa kondusif, dan bisa juga tidak kondusif tergantung dari seberapa ramai kelas perpustakaan saat berlangsungnya mata pelajaran penghayat kepercayaan Sapta Darma. Menurut Kardiono, "Pas ketika anak jum'atan beliau mengajar di perpustakaan, dikasih waktu disitu, face to face seperti prifat karena cuma satu anak".[142]

Menurut pengamatan peneliti, fasilitas penunjang proses belajar mengajar berupa bangku dan ruang sudah terpenuhi dan tersedia, akan tetapi pemakaian dari fasilitas tersebut bersama-sama dengan siswa lain yang sedang melakukan pembelajaran juga di perpustakaan ataupun siswa yang sedang membaca di perpustakaan.

2. SMP 59 Surabaya

Kelas pada SMP 59 Surabaya untuk penghayat kepercayaan ini berlangsung secara suka rela dari pihak pengajar. Pihak sekolah yang memberikan kebebasan kepada pengajar, memberikan implikasi pada

---

[141] Dian Jennie Tjahjawati, *Wawancara*, Jln Wijaya Kusuma No. 48, Surabaya, 22 Februari 2019.

[142] Kardiono, *Wawancara*, Jln Wijaya Kusuma No. 48, Surabaya, 5 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan pengajar yang tidak melakukan kegiatan belajar mengajar pada sekolah, meskipun sekolah sudah menyiapkan tempat untuk kegiatan kelas penghayat tersebut pada ruang kosong ataupun perpustakaan yang belum terpakai di sekolah.

> Karena memang orangnya memang meminta begitu, yang kedua, orangnya kan bukan sarjana, tidak punya ijazah sarjana. Yang mengajar itu tidak punya gelar pendidikan penghayat kepercayaan, karena memang belum ada. Punyanya Cuma sertifikat saja. Secara hukum atau akademik, itu belum sah.[143]

Proses belajar mengajar dan penilaian yang dilakukan pada rumah pengajar berlangsung santai dan agak bebas mengingat tempat tersebut bukanlah institusi resmi.pembelajaran yang dilakukan di rumah yang termasuk dalam kawasan komplek perumahan tersebut termasuk hening dan kondusif untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. pihak sekolah memberikan jurnal dan juga absensi serta amanat tugas kepada pengajar selama mengadakan kelas di luar sekolah.Menurut Nur Diana, "Tapi itu sudah keputusan pengajarnya yang minta di luar sekolah, jadi kami hanya memberikan jurnal untuk laporannya dan absensi untuk kehadiran sama nilainya".[144] Ketika pengumpulan nilai dibutuhkan, pengajar akan menyerahkan kepada tata usaha sekolah untuk kemudian diproses nilainya. Menurut Fitirana Isni, "Nilainya itu selalu diserahkan langsung ke tata usaha. saya sebagai wali kelas cuma absensinya saja".[145]

---

[143] Hernowo, *Wawancara*, Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 28 Februari 2019.

[144] Nur Diana Dewi *Wawancara*, Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 25 Maret 2019.

[145] Fitria Isni Amaliyah, *Wawancara*, Jl. Klumprik PDAM Surabaya, 25 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

ANALISA DATA

A. Kebijakan Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di Sekolah

1) Kebijakan Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMA 9

Kebijakan merupakan dasar dalam penentuan keputusan yang diambil bersama untuk rancangan program ke depan. Akan tetapi, dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa SMA 9 tidak memiliki kebijakan tertulis terkait dengan pengadaan kegiatan belajar mengajar untuk anak penganut penghayat kepercayaan Sapta Darma yang ada pada sekolah SMA 9 Surabaya tersebut. Hal ini didasari pada eksistensi sekolah tersebut yang berdiri sebagai sekolah Negeri yang artinya mengikuti peraturan, undang-undang, dan keputusan pemerintah yang diturunkan baik dalam skala lokal maupun nasional. Dalam hal ini, pemerintah sudah membuat kebijakan sesuai dengan teori advokasi milik Hudson, yakni menyusun kebijakan yang bersifat nasional. Baik pihak dinas mupun sekolah sengaja tidak menciptakan kebijakan milik mereka sendiri dan mengikuti sepenuhnya kebijakan yang ada dari pemerintah.[146] Dalam penelitian ini, penghayat kepercayaan tersebut adalah Sapta Darma.

Hashbullah menyebutkan dalam teorinya mengenai teori perumusan kebijakan pendidikan bahwa teori radikal, menakankan bahwa sekolah bebas

[146] Pada saat wawancara, kepala sekolah SMAN 9 menerangkan pada peneliti bahwa mereka memang sengaja tidak menciptakan kebijakan dalam bentuk tertulis karena dikhawatirkan akan membebani penganut penghayat itu sendiri, berusaha menyikapinya dengan hati-hati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusun kebijakan pendidikan. Hal ini benar dilaksanakan oleh pihak sekolah dengan memberikan dana transportasi dan penempatan kelas pada perpustakaan.

Kemudian sesuai pada teori selanjutnya yakni transaktif, yang dimana perumusan perlu didiskusikan dengan semua pihak terkait. SMA 9 Surabaya kemudian memutuskan dalam rangka menindaklanjuti hak didik anak tersebut, maka pihak sekolah merasa bahwa itu adalah kewajiban mereka untuk mendatangkan guru ataupun pengajar ke sekolah, yang kemudian setelah berkoordinasi dengan pengajar penghayat tersebut mengenai kelas yang akan diajar, melahirkan keputusan untuk memberikan dana transportasi kepada pengajar agar dapat datang ke sekolah dan melakukan kegiatan belajar mengajar disana. Pihak sekolah menilai bahwa pengajar tersebut bukan termasuk guru karena pengajar tersebut tidak memiliki ijazah keguruan dan hanya memiliki sertifikasi mengajar dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam bidang Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hanya memberikan biaya transportasi kepada pengajar tersebut.[147]

Peneliti menilai, keputusan sekolah itu sendiri untuk mengadakan pendidikan penghayat kepercayaan sudah merupakan bentuk nyata dari pendidikan multikulural. Pendidikan multikultural itu sendiri menurut James Banks adalah suatu ide atau gagasan, pendidikan yang maju, dan sebuah proses yang memiliki tujuan untuk merubah struktur dari institusi pendidikan

[147] Dian Jennie selaku pengajar menjelaskan bahwa beliau melakukan pengajaran dengan tanpa pamrih di sekolah tanpa imbalan karena ini adalah kewajibannya sebagai seorang penghayat kepercayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar murid laki-laki dan perempuan, murid berkebutuhan khusus, dan murid dari ras, etnis, suku, bahasa dan budaya yang berbeda-beda memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan. Tindakan sekolah ini memiliki makna ganda, selain memenuhi hak didik anak mengingat sekolah tersebut adalah sekolah negeri, tetapi juga mengajarkan kepada siswanya mengenai realitas masyarakat heterogen dan plural. Selain itu, mengajarkan pada siswa-siswinya sejak dini bahwa adanya kelompok keyakinan lain selain agama yang sudah diakui dan diresmikan oleh pemerintah, yakni penghayat kepercayaan.

Mengenai kebijakan tidak tertulis tersebut, dalam hal ini, Nanang Fattah dalam bukunya *Analisis Kebijakan Pendidikan* menyebutkan teori kebijakan yang dimana kebijakan perlu menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan. Pemerintah sudah menentukan bahwa perlunya pemenuhan Hak pendidikan bagi anak penganut penghayat kepercayaan melalui Permendikbud nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Penghayat Kepercayaan pasal 1 no. 1 sebagai asas dasarnya.

Realisasi dari kebijakan tersebut yang dilakukan oleh SMA 9 menandakan bahwa sekolah tersebut memang bergerak sesuai dengan aturan dari pemerintah dengan memenuhi hak pendidikan warga negara. Pendidikan termasuk dalam hak yang tercantum dalam undang-undang kovenan sipol (sipil dan politik) yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Hak pendidikan tersebut tertuang dalam bagian III pasal 18. Serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Bab 1 Pasal 1.

Hal ini tak hanya berlaku untuk penganut penghayat kepercayaan Sapta Darma saja, akan tetapi juga dengan seluruh agama yang ada di sekolah tersebut dengan memanggilkan guru yang seagama dan memiliki keyakinan yang sama dengan anak tersebut dan kemudian mengatur jam pelajaran serta kurikulumnya.[148] Serta pihak sekolah menyetujui diadakannya kelas penghayat kepercayaan disekolah tersebut karena menghormati keputusan dari wali murid dan murid sendiri tersebut yang tidak ingin "memalsukan" keyakinan yang diimaninya seperti yang terjadi pada saat murid tersebut duduk di bangku SMP yang dimana tertera sebagai seorang Muslim. Dari sikap tersebut cukup menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan atau mempraktekkan pendidikan multikultural.

Penghayat kepercayaan yang ada pada sekolah tersebut adalah Sapta Darma. Sapta Darma sendiri bisa dibilang sebagai kelompok penghayat kepercayaan terbesar dan paling banyak penganutnya, karena banyak pengikutnya tersebutlah, memberikan implikasi kepada progresnya dalam kepengurusan administrasi yang lebih cepat dan lebih maju dari kelompok penghayat kepercayaan yang lainnya.[149]

---

[148] Kardiono selaku Waka Kurikulum menjelaskan setidaknya ada sekitar 25 anak dengan berbagai campuran agama dari Kristen, Katolik, Hindu, dan Sapta Darma yang ada di sekolah tersebut.

[149] Dian Jennie selaku pengurus dari MLKI menjelaskan bahwa sejauh ini, Sapta Darma adalah yang paling banyak dianut di Indonesia. Akan tetapi, untuk pengajarannya sudah ada beberapa Penghayat Kepercayaan lain yang sudah memulai di sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kebijakan Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMP 59

SMP 59 dalam menanggapi adanya Murid seorang penganut penghayat kepercayaan, tidak menciptakan atau membuat kebijakan secara tertulis ataupun bersifat resmi, dan juga mengikuti serta menaati aturan yang ada dari pemerintah.[150] Eksistensi sekolah tersebut yang juga merupakan sekolah Negeri mengharuskan sekolah ini untuk mengikuti peraturan, undang-undang, dan keputusan pemerintah yang diturunkan baik dalam skala lokal maupun nasional. Dalam hal ini, pemerintah sudah membuat kebijakan sesuai dengan teori advokasi milik Hudson, yakni menyusun kebijakan yang bersifat nasional. Jadi dalam mengadakan kelas ini, sekolah berpijak pada Permendikbud No. 27 tahun 2016 serta sesuai dengan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik tersebut dijelaskan mengenai hak pendidikan yang tertuang dalam bagian III pasal 18.

Keputusan untuk melegalkan pendidikan untuk anak penghayat kepercayaan itu adalah bukti nyata bahwa sekolah telah menerapkan pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi anak penganut penghayat kepercayaan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan menurut James Banks adalah suatu ide atau gagasan, pendidikan yang maju, dan sebuah proses yang memiliki tujuan untuk merubah struktur dari institusi pendidikan agar murid laki-laki dan perempuan, murid

[150] Nur Diana Dewi selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa pihak seekolah memang tidak membuat kebijakan tertulis ataupun resmi karena sudah ada aturan dari pemerintah, jadi pihak sekolah hanya mengadakan apa yang sudah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkebutuhan khusus, dan murid dari ras, etnis, suku, bahasa dan budaya yang berbeda-beda memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan.

Kemudian, Nanang Fattah dalam bukunya *Analisis Kebijakan Pendidikan* menyebutkan teori kebijakan yang dimana kebijakan perlu menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan. Pihak SMP 59 Surabaya juga melakukan realisasi dari peraturan pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan khususnya pendidikan agama. Pendidikan agama juga terkandung dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 tahun 2003), Pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 poin 2, serta pada pasal 3 Serta Peraturan pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Bab 1 Pasal 1.

SMP 59 Surabaya termasuk dalam sekolah yang sangat peduli akan pendidikan agama dan akhlaq murid. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas sekolah setiap hari yang bersifat agamis dan cenderung mendidik murid agar menjadi manusia yang lebih berakhlaq.[151] Sekolah ini juga terasa kental keagamaannya dengan banyaknya stiker Asmaul Husna yang tertempel pada setiap pillar gedung sekolah. Stiker ini ditempel dengan maksud agar murid yang beragama Islam dapat menghapalkan nama-nama Allah. Berbagai

[151] Peneliti menemukan bahwa SMPN 59 memiliki slogan “Asmat” (Assalamualaikum, minta tolon, dan terima kasih). Slogan ini terpampang jelas pada pintu masuk sekolah. Selain itu Hernowo selaku Kurikulum sekolah juga menyebutkan bahwa sekolah memiliki jadwal sholat rutin seperti sholat wajib dan dhuha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

temuan tersebut meyakinkan peneliti bahwa sekolah tersebut memang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya sesuai pada teori milih Hashbullah yakni transaktif, yang dimana perumusan perlu didiskusikan dengan semua pihak terkait. Begitu wali murid Bangkit mengakui bahwa anak tersebut adalah seorang penghayat kepercayaan kepada sekolah, Pihak sekolah kemudian setuju untuk mengadakan kelas penghayat kepercayaan dengan syarat wali murid mampu mencarikan guru untuk anak tersebut. Seperti pada SMA 9, penghayat kepercayaan yang dianut oleh anak tersebut adalah Sapta Darma. Kemudian wali murid menemukan guru yang memang sudah disediakan oleh pihak penghayat kepercayaan sendiri dan berkoordinasi dengan pihak sekolah mengenai kurikulum yang ternyata sudah dimiliki untuk skala nasional. Pihak sekolah bersedia memberikan ruang kelas kosong atau perpustakaan untuk kegiatan belajar mengajar akan tetapi pengajar memilih untuk melakukan kelas tersebut pada sanggar dan rumah pengajar agar dapat efisien.

Pengajar penghayat kepercayaan tersebut menjelaskan keputusan itu diambil karena hanya ada satu murid saja yang diajar. Disini peneliti menilai bahwa, hal ini adalah kewenangan sekolah. Sesuai dengan Teori radikal milik Hashbullah, yakni menekankan pada kebebasan lembaga lokal dalam menyusun sebuah kebijakan pendidikan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana proses dan nilai anak tersebut, pihak sekolah lalu memberikan jurnal mengajar serta absensi kepada pengajar tersebut dengan tujuan agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelak pada saat penilaian semester diperlukan, maka akan dikumpulan pada pihak Tata Usaha sekolah untuk kemudian dicantumkan nilainya pada rapot anak tersebut.

Jika dilihat disini, sekolah sudah memberikan kontribusi aktif terkait dengan kelas penghayat kepercayaan tersebut dengan memfasilitasi dan memberikan kebebasan kepada pengajar dan murid untuk memilih agama atau keperercayaan apa yang ingin dipelajari anak tersebut, dan dimana melakukan kegiatan belajar mengajar.[152] hal ini menandakan bahwa sekolah sudah menjunjung nilai multikultural dan menghargainya dengan mengadakan kelas tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip Pendidikan multikultural yang ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai suatu keniscayaan, kemudian bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan toleran dan semangat egaliter. Sikap toleran sekolah terlihat dari keputusan sekolah yang memberikan kebebasan tersebut, dan menyediakan pendidikan dengan dasar kebijakan yang kuat, yakni dari Permendikbud nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Penghayat Kepercayaan pasal 1 no. 1. Juga sesuai dengan peraturan daerah Jawa Timur No. 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam pasal 13 c. Kemudian, dengan berdasar poin penting dalam peraturan Jawa Timur tentang pendidikan daerah yakni pada pasal 10 poin a kewajiban pemerintah provinsi yaitu: “memberikan layanan dan kemudahan,

[152] Pada saat pendaftaran masuk SMPN 59 dahulu, Bangkit terdaftar sebagai seorang Muslim dalam rapot SD. Bahkan pihak sekolah menjelaskan bahwa anak tersebut termasuk fasih dalam membaca al-Qur’an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap peserta didik tanpa diskriminasi".

B. Praktek Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di Sekolah

1) Praktek Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMA 9

Pada SMA 9 praktek kelas Penghayat Kepercayaan Sapta Darma dilakukan secara tatap muka antar seorang pengajar dan murid. Pengajar dalam kelas tersebut yakni Dian Jennie dan Nanda Meg sebagai muridnya. Kegiatan belajar mengajar kelas tersebut diadakan di perpustakaan ataupun pada laboratorium sekolah.[153] Peneliti manggunakan teori George C. Edward III yang menjelaskan bahwa perlu adanya implementor dalam eksekusi kebijakan pendidikan, ada dan hadirnya pengajar tersebut dalam proses belajar mengajar mengindikasikan bahwa sekolah berhasil menciptakan ketersediaan dan juga menciptakan komitmen untuk mengeksekusi kelas tersebut.

Kelas tersebut diselenggarakan pada setiap hari jum'at pada pukul 11:45 WIB dan berdurasi satu kali pertemuan yakni 45 menit hingga pukul 12:30 WIB. Akan tetapi, pihak sekolah menjelaskan pada peneliti bahwa setiap pertemuan mata pelajaran agama memiliki jatah durasi waktu tiga kali pertemuan. Sementara pada realisasi yang ada, Dian Jennie hanya melakukan satu kali pertemuan disekolah. Hal ini sebetulnya bertentangan dengan peraturan yang ada di sekolah dan Pedoman Implementasi yang ada. Hal ini

[153] Shadeli selaku kepala sekolah menjelaskan pada peneliti bahwa tidaklah efektif jika kelas tersebut diadakan di ruang kelas, karena hanya memiliki satu murid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat disayangkan, karena pengajar disini jelas telah mengurangi jam pelajaran yang harusnya tiga jam pertmuan menjadi hanya satu jam pertemuan. pengajar di kelas tersebut mengaku memiliki banyak kesibukan karena posisinya sebagai ketua dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). Akan tetapi hal ini tetaplah termasuk sebagai suatu pelanggaran berupa korupsi waktu jam belajar mengajar.. Meskipun terjadi pemotongan waktu pada jam pembelajaran seperti itu, setidaknya pengajar dalam hal ini menyempatkan waktu untuk dapat memberikan materi kepada anak tersebut. Jadi, berkenaan dengan keterediaan sumber daya manusia telah terpenuhi, meskipun tidak secara maksimal.

Kelas tersebut diadakan di perpustakaan atau laboraorium sekolah. Keputusan ini diambil karena hanya ada satu anak saja yang diajar dalam kelas tersebut, sekolah menimbang bahwa kurang tepat jika memberi satu ruang kosong karena akan terlalu berlebihan untuk jumlah pengikut kelas tersebut. Jadi untuk unsur disposition pada SMA 9 telah terpenuhi. Penyediaan tempat dalam perpustakaan tersebut sudah termasuk dalam pemenuhan fasilitas yang harus dipenuhi oleh sekolah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yakni pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal pasal 40 No. 1 pada poin (e) yang menyebutkan : “Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas.”

Ketersediaan sumber daya juga dibutuhkan dalam praktek pendidikan. Pihak penghayat sendiri telah menyediakan pengajar, sumber daya yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan sekolah yakni ruang perpustakaan. Meskipun dalam pengamatan peneliti, suasana belajar mengajar pada perpustakaan sangat relatif tergantung dari ramai atau tidaknya perpustakaan tersebut. Jam pelajaran yang dimulai pada pukul 11:45 WIB berbarengan dengan waktu istirahat sekolah, dimana siswa dapat pergi ke perpustakaan untuk sekedar membaca buku ataupun mengerjakan tugas. Di lain sisi, perpustakaan juga digunakan untuk kegiatan kelas agama Kristen di waktu yang bersamaan. Jadi, penggunan perpustakaan sebagai ruang kelas ini dirasa cocok akan tetapi tidak menguntungkan di waktu yang sama. Di lain sisi suasananya akan berbeda lagi jika kelas tersebut berada di laboratorium yang kondisinya lebih kondusif dan cocok untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.

Metode yang digunakan dalam pembelajaran pada siswa penghayat kepercayaan di SMA 9 adalah metode konvensional dan inquiry. Metode ini menurut penulis adalah metode yang cocok untuk anan SMA karena banyaknya tugas dan mata pelajan yang lain, mengjadikan murid harus memahami banyak hal dalam satu waktu tertentu. Konvenional cocok karena murid hanya perlu menerima apa saja yang diberikan atau diajarkan oleh pengajar. Selain itu, pada pendidikan keagamaan atau keyakinan, memang pantasnya siswi atau pelajar cukup menerima saja. Kemudian pada akhir pembelajaran menggunakan metode inquiry yang mengulang kembali apa yang sudah didapatkan hari ini untuk menguji daya tangkap siswi. Hal ini juga diungkapkan oleh James Banks adalah sebagai *An Equity Pedagogy*, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa. Sekolah juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah memberikan figur keragaman ras secara langsung, sesuai dengan salah satu dimensi pendidikan menurut James Banks yakni *An Empowering School Culture And Social Structure.*

Seperti pada kelas umumnya, kelas ini melangsungkan kegiatan belajar mengajar secara umum. Adanya penilaian tugas, ulangan harian, dan ulangan akhir semester. Setiap akan mengawali kegiatan belajar mengajar, mereka melakukan doa terlebih dahulu. Kemudian pengajar sudah sanggup mengajar seperti guru pada umumnya yang melakukan interaksi tanya jawab agar kelas lebih komunikatif, adanya praktek ibadah, pemahaman mendalam tentang keyakinan, dan evaluasi belajar harian. Saat kelas selesai, ditutup dengan berdoa bersama. Praktek ini secara keseluruhan telah berpedoman pada poin-poin yang ada pada Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadadp Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan..

2) Praktek Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMP 59

Proses kegiatan belajar mengajar pada SMP 59 dilakukan di dua tempat, antara rumah pengajar yang beralamat di Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya atau di sanggar yang berada di daerah Jemursari. Akan tetapi peneliti lebih berfokus pada Pembelajaran yang dilakukan di rumah karena pembelajaran yang diadakan di sanggar ada kelas bersama yang dilakukan banyak anak penghayat dari berbagai kalangan seperti sekolah minggu.

Praktek pendidikan pada rumah pengajar ini, peneliti menilai, berlawanan dengan cita-cita Tujuan Dinas Pendidikan Jawa Timur yakni meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan mutu pendidik, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan fasilitasi hasil karya cipta pendidikan tinggi. Keputusan sekolah yang tidak memberikan apapun (dalam hal ini termasuk dana transportasi) kepada pengajar yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengajar anak tersebut adalah berlawanan dengan tujuan Dinas Pendidikan Jawa Timur tersebut. Memang pengajar bukanlah seorang guru dengan ijazah keguruan yang legal, akan tetapi peneliti menilai seharusnya pihak sekolah memberikan sesuatu sebagai timbal balik mengingat kontribusi pengajar tersebut adalah bagian penting dari implementasi Undang-Undang Permendikbud mengenai Pendidikan Penghayat Kepercayaan yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah.

Kegiatan belajar mengajar ini dilakukan secara tatap muka antar pengajar dan murid yang berlangsung selama satu jam pada hari minggu. Hal ini sebenarnya berlawanan dengan ketentuan yang telah dibuat dalam Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadadp Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan yang mana di dalamnya telah tercantum alokasi 3 jam pelajaran. Hal ini peneliti menilai sekali lagi adalah pelanggaran karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh kebijakan yang ada.

Mengenai waktu dilaksanakannya, peneliti menemuan bahwa jam tersebut menyesuaikan dengan kesanggupan pengajar. Misal, pada hari minggu tersebut jika pengajar sanggup melakukan kegiatan belajar pagi, maka akan dilaksanakan pukul 08:00 WIB. Akan tetapi, jika pengajar tidak berkenan ataupun memiliki kesibukan lainnya sehingga tidak sanggup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajar, maka kelas tersebut akan dipindah pada sore hari pukul 16:00 WIB. Tentu saja, sebelumnya akan diadakan komunikasi terlebih dahulu sehari sebelum kelas tersebut dilaksanakan. Komunikasi antar siswa dan pengajar tersebut memang diperlukan dalam pratek pendidikan, sesuai dengan salah satu teori milik George C. Edward III (1980) dalam empat variable implementasi kebijakan pendidikan tentang komunikasi. Komunikasi berkenaan dengan bagaimna kebijakan pendidikan dikomunikasikan pada organisasi publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan pendidikan disusun. Kemudian, berkenaan dengan keterediaan sumber daya manusia telah terpenuhi, meskipun tidak secara maksimal.

Praktek atau kebijakan bisa jadi sangat rumit dan kompleks dibandingkan dengan perumusannya. Sikap sekolah yang memberikan kebebasan dan membiarkan pengajar dalam memilih tempat diadakannya kelas bisa di indikasikan sebagai sikap toleransi terhadap kesanggupan pengajar yang tidak dinilai oleh sekolah sebagai seorang guru tersebut. Adanya hambatan dan kesibukan yang lain membuat pengajar tersebut harus memfokuskan dirinya tidak hanya pada satu bidang, akan tetapi pda banyak bidang karena sejatinya pengajar tersebut juga buka guru yang memiliki ijazah guru, karena belum adanya ijazah pengajar ajaran penghayat kepercayaan di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam prakteknya, kelas ini dilakukan dengan cara yang umum dilakukan pada saat pembelajaran di kelas. Dimulai dengan berdoa bersama, kemudian mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, dan mengumpulkan tugas jika ada. Pengajar menjelaskan dan murid mendengarkan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk mengetahui seberapa paham murid tentang materi yang telah diberikan dan agar kelas lebih komunikatif dan aktif. Adanya tugas, pekerjaan rumah, praktek, ulangan harian dan ulangan akhir semester agar ada nilai yang dapat dimasukkan dalam rapot. Setelah kelas selesai, diakhiri dengan berdoa bersama dan pemberian tugas.

Praktek kelas ini menggunakan tiga metode, yakni metode konvensional, diskusi dan resitasi. Konvensional, yakni metode ceramah bisa dilihat dari pengajar yang memberikan materi secara lugas dan murid disini hanya mendengarkan. Metode ini sesuai dengan pendidikan keagamaan karena sejatinya siswi tersebut hanya perlu menerima doktrin yang diberikan. Kemudian diskusi karena terkadang, peneliti menemukan bahwa pengajar dibeberapa titik berusaha melakukan interaksi berupa Tanya jawab seputar materi yang diberikan dan membimbing murid agar dapat berpikir dan mengutarakan pendapatnya. Resitasi, terlihat dari pengajar yang terkadang menuntut dan mewajibkan murid agar mencatat dan meresume apa yang telah dipelajari hari itu. Metode-metode ini memenuhi salah satu kriteria dimensi pendidikan multikultural menurut James Banks yakni *An Equity Pedagogy* dan juga *An empowering School Culture And Social Structure.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Evaluasi Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di Sekolah

1) Evaluasi Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMA 9

Usaha pendidikan penghayat kepercayaan Sapta Darma yang sudah dilakukan selama dua tahun di sekolah tersebut adalah bisa dibilang berjalan dengan lancar akan tetapi belum cukup baik. Peneliti menilai seperti itu karena Undang-Undang dan perturan pemerintah yang masih cukup baru serta prakteknya yang belum lama dilaksanakan di sepanjang sejarah perjalanan usaha Penghayat Kepercayaan dalam menyetarakan diri dengan agama resmi di Indonesia. Dalam hal ini, Hasbullah dalam bukunya *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Inddonesia* bahwa evaluasi diperlukan agar dapat mengetahui seberapa jauh proses pendidikan agar dapat dikaji ulang dan menghasilkan masukan-masukan untuk penyempurnaan kebijakan selanjutnya.

Beberapa faktor yang menjadikan inplementasi kebijakan pendidikan tersebut berjalan dengan baik adalah karena: (1) pengajar yang datang ke sekolah. Peneliti melihat, saat sekolah memutuskan untuk memberikan dana transportasi kepada pengajar, saat itu juga sekolah menghormati dan menghargai kesanggupan pengajar yang berkenan untuk mengajar muridnya. Selain itu, murid juga tidak perlu datang jauh ke tempat lain seperti sanggar ataupun rumah pengajar untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, jadi ada keuntungan berupa efisiensi waktu yang didapatkan murid. Akan tetapi di sisi lain, penempatan pada perpustakaan dirasa peneliti kurang tepat karena perpustakaan pada jam dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relatif tidak kondusif dan ramai, bisa mengakibatkan pecahnya konsentrasi dan fokus antara pengajar dan murid.

Siswa penganut penghayat kepercayaan Sapta Darma tersebut memiliki nilai yang cukup baik dalam pembelajarannya. Hal ini semakin terlihat dan meyakinkan peneliti karena anak tersebut termasuk dalam kelas yang dimana termasuk dalam anak-anak pintar, yakni XI IPA 1. Komunikasi yang terjadi antar sesama Penghayat Kepercayaan antara siswa dengan guru menciptakan hubungan yang baik dan berdampak pada pemahaman materi terkait dengan mata pelajaran tersebut.

Dampak dari merealisasikan dan menjalankan kegiatan belajar mengajar sesuai peraturan yang ada, secara langsung sekolah menunjukkan keterbukaannya akan keragaman dan tingkat multikultural di sekolah tersebut. James Banks menyebutkan dalam *Multicultural Educations Issue and Perspective* menyebutkan bahwa hal ini termasuk dalam salah satu dimensi pendidikan multicultural yakni *An Empowering School Culture And Social Structure,* sekolah yang memberikan figur keragaman ras, budaya, gender, dan keadilan sosial.[154] Figur yang ada adalah dari pengajar kelas tersebut yang dapat memotivasi murid tersebut secara langsung bahwa bahkan sebagai penganut Sapta Darma sendiri dapat sukses tanpa perlu menyembunyikan identitas. Akan tetapi ini menjadi pedang bermata pisau ganda, karena pengajar tersebut juga memiliki banyak kesibukan. Perlu

[154] James A. Banks, Cherry A. McGee Banks edt., *Multikultural Education Issues and Perspective,* (Amerika: John Wiley dan Sons, 2010), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pengajar lain dari keyakinan yang sama agar dapat memaksimalkan dan mengaktualkan pendidikan tersebut agar hasilnya lebih maksimal.

Peneliti memandang, sekolah yang berada di pusat kota tersebut memiliki murid yang telah memahami dan mengerti akan perbedaan. Hal ini tercermin dari dialog yang sering terjadi antara Nanda dan teman-teman sekelasnya yang daripada menjustifikasi kebenaran kepercayaannya, tetapi justru mencari tahu merespon baik dengan bertanya langsung kepada anaknya dan menghargai perbedaan tersebut.

Hal ini akan meningkatkan harapan para penganut penghayat kepercayaan untuk dapat mengenyam pendidikan yang sesuai karena sekolah yang progresif dalam mengikuti perkembangan perturan dan undang-undang terbaru pemerintah mengenai penghayat kepercayaan. Implementasi ini secara tidak langsung kepada murid-murid disekolahnya mengenai keberadaan penghayat yang sejatinya sudah diakui oleh pemerintah dan mengajarkan konsep pluralitas serta keragaman agama dan budaya. Selain itu juga meralisasikan perda pendidikan Jawa Timur Pasal 3: penyelenggaraan pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif demokratis, dan bertanggung jawab.

2) Evaluasi Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMP 59

Realisasi dan eksekusi dari Permendikbud No. 27 tahun 2016 yang sudah dilakukan selama setahun di SMPN 59 tersebut bisa dibilang kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik. Hal ini dikarenakan meskipun pihak sekolah sudah menawarkan untuk menggunakan fasilitas sekolah berupa ruang kosong yang belum terpakai atau perpustakaan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, akan tetapi pengajar merasa tidak bisa melakukannya di sekolah. Pengajar mengaku keberatan jika cuma harus mengajar satu anak saja disekolah yang jauh. Selain itu, pihak sekolah yang tidak menganggap pengajar tersebut sebagai guru dan tidak memberikannya dana transportasi untuk mengajar menjadi penyebab lain dari tidak dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akan tetapi, hal ini menurut peneliti juga memberikan dampak baik karena saat kelas berlangsung di rumah pengajar maupun sanggar, maka akan berlangsung dengan kondusif dan tidak ada gangguan. Di lain sisi, ini juga termasuk keuntungan karena semakin kondusif kondisi kelas, maka akan semakin besar kemungkinan ilmu yang tersampaikan pada murid. Ini terlihat dari nilai murid tersebut yang cenderung bagus dalam kelas penghayat kepercayaan Sapta Darma.

Siswi penganut Sapta Darma tersebut dalam kegiatan belajar mengajar penghayat kepercayaan memiliki nilai yang bagus. Hal ini terlihat dari nilai-nilainya tidak ada yang dibawah angka 80 baik dalam nilai tugas, ujian harian, uajian tengah semester, dan praktek. Nilai untuk ujian akhir semester belum ada dikarenakan pada saat penelitian belum sampai pada waktu pelaksanaan ujian akhir semester.

Implikasi dari implementasi kebijakan pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 tahun 2017 dalam sekolah tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat sekolah tersebut masuk dalam sekolah yang mulai mengaplikasikan pendidikan multikultural karena sanggup menerima perbedaan dan keragaman dalam masyarakat yang terproyeksikan dalam diri murid-murid sekolah tersebut. Akan tetapi, peneliti menemukan bahwa realitasnya, sekolah tersebut tidak seindah itu. Dalam penemuan peneliti di lapangan, sekolah tersebut termasuk dalam sekolah yang agamis dan memiliki sentimen keagamaan yang tinggi.

Alasannya adalah karena sekolah mengetahui bahwa anak tersebut dahulu sebelum pemerintah meresmikan segala aturan mengenai penghayat kepercayaan, anak tersebut termasuk dalam Agama Islam, dan hal ini disayangkan oleh para pengajar disekolah tersebut. Selain itu, pihak sekolah memiliki intensi yang baik dengan melakukan berbagai kegiatan keagamaan yang bertujuan meningkatkan iman dan taqwa murid.

Peneliti mengkhawatirkan bahwa hal ini bisa jadi akan berakibat pada munculnya pemahaman monokultur dalam sekolah tersebut. Bikhu Parekh dalam bukunya *Rethinking Multiculturalism* menjelaskan bahwa Pendidikan semacam itu cenderung tidak mengembangkan kemampuan imajinatif karena pendidikan monokultur tidak menyemangati ilusi bahwa batas suatu dunia adalah batas dari dunia yang bersangkutan, bahwa jalan pikiran konvensional merupakan satu-satunya kebenaran, maka akan mengeluarkan kesadaran alternatif dan mematikan imajinasi.[155] Para murid dikhawatirkan akan cenderung menilai budaya dan masyarakat lain menurut norma dan tolok

[155] Pada hal ini maksud dari monokultur disini adalah agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ukur mereka sendiri, menganggapnya aneh, bahkan tidak berharga. Monokultur juga cederung mengembangkan arogansi, ketidakpekaan, dan rasisme. Hal ini adalah berlawanan dengan pendidikan multikultural yang seharusnya berlaku di masyarakat yang plural seperti di Indonesia.

Sentimen guru terasa sangat kentara saat peneliti melakukan wawancara di sekolah tersebut. Sekolah tersebut memang sekolah Negeri yang sifatnya umum, akan tetapi peneliti menilai bahwa sekolah tersebut memiliki semangat yang besar dalam pendidikan keagamaan, khususnya agama Islam sebagai mayoritas didalamnya. Hal ini terlihat dari tingginya intensitas sholat berjamaah, seperti sholat dhuha dan sholat wajib, serta adanya stiker Asmaul Husna di setiap pillar bangunan sekolah. Hal ini peneliti memandang bahwa sekolah tersebut memiliki sentiment keagamaan yang tinggi dengan praktek monokultur keagamaannya.

Temuan pada lapangan menyebutkan bahwa Bangkit memiliki hubungan yang baik dengan teman-temannya. Terlihat dari interaksi bersama dan teman-temannya yang menghargai perbedaan yang dimilikinya. Wali kelasnya juga menyebutkan bahwa anak tersebut meskipun sedikit pendiam akan tetapi ceria dan tidak memiliki masalah sosial dengan kawan sekelasnya. Temuan tersebut menjadi landasan dasar dari keberhasilan sekolah dalam mengenalkan siswa-siswinya kepada penghayat kepercayaan dan konsep multikultural dengan interaksi langsung. Pendidikan berparadigma

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

multikultural mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan iklusif.[156]

Dengan adanya kelas penghayat Sapta Darma dan kelas agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu, maka secara langsung sekolah telah mengajarkan kepada murid-murid tentang keberagaman dan pentingnya hidup berdampingan bersama agar tercipta kerukunan dan perdamaian melalui pemenuhan hak-hak sipil warga negara seperti Pendidikan keagamaan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pendidikan penghayat kepercayaan tersebut juga meningkatkan harapan penganut penghayat kepercayaan yang lainnya bahwa sekarang pemerintah sudah adanya ketersediaan sekolah yang berhasil dan sanggup menjalankan peraturan mengenai hak pendidikan serta tidak perlu lagi memalsukan diri dengan mencantumkan sebagai penganut agama lain yang tidak diyakini.

[156] Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) SMA 9 dan SMP 59 Surabaya tidak memiliki kebijakan tertulis milik sendiri terkait dengan pelaksanaan penyelengggaraan kegiatan belajar mengajar kelas penghayat kepercayaan Sapta Darma. Meskipun demikian, kedua sekolah tersebut tetap memiliki dasar pijakan dalam pengadaan kelas penghayat kepercayaan, yakni dari Peraturan maupun Undang-Undang pemerintah. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak pendidikan keagamaan adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah. Saat usaha pemenuhan hak tersebut, sekolah saat itu juga sudah mulai mengajarkan secara tidak langsung kepada murid-muridnya mengenai multikulturalisme dan sekaligus menunjukkan pada masyarakat bahwa sekolah sudah mulai menerapkan pendidikan yang memahami perbedaan dalam keragaman masyarakat heterogen Indonesia. Kedua sekolah tersebut dalam perancangan kegiatan belajar mengajar memiliki peraturan atau kebijakan yang berbeda, hal ini kemudian berpengaruh dalam pelaksanaan prakteknya.
2) Ada persamaan dan perbedaan dalam praktek di kedua sekolah tersebut. Contohnya yaitu memiliki pengajar yang sama untuk kedua sekolah dan masing-masing sekolah memiliki murid dengan jumlah yang sama. Persamaan lainnya yang dimiliki, yakni sama-sama kurangnya dalam jam pembelajaran Perbedaan yang dimiliki terlihat dengan diadakannya kelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut pada luar ruang kelas, seperti di perpustakaan atau laboratorium pada SMA 9 dan rumah pengajar atau Sanggar pada SMP 59. Praktek pendidikan penghayat kepercayaan sendiri juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan multikultural yang memenuhi hak peserta didik, meskipun masih ada banyak hal yang perlu dibenahi.

3) Pendidikan penghayat kepercayaan di sekolah dengan dasar Undang-undang yang masih cukup baru dari pemerintah memberikan efek pada implementasi kebijakan pada sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu banyak pembenahan dan improvisasi dari berbagai pihak yang ikut berperan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tersebut. Dukungan dari kedua sekolah sangat berarti, seperti pemberian fasilitas berupa ruang untuk pembelajaran atau pemberian *feedback* pada pengajar. Dengan adanya pelegalan dan praktek pendidikan penghayat kepercayaan di sekolah yang terbukti berhasil, menunjukkan dan memberikan harapan pada penganut penghayat kepercayaan yang lainnya di seluruh Indonesia akan bentuk nyata pemenuhan hak untuk mereka dari pemerintah.

B. Saran

1) Kepada kedua sekolah untuk lebih mempertegas dan merancang realisasi dari Permendikbud yang sudah diterapkan di kedua sekolah tersebut. Dengan merancang kebijakan milik sendiri, baik tertulis maupun tidak, akan memberikan gambaran yang jelas kepada pihak penghayat kepercayaan yang terkait. Hal ini bertujuan agar dapat lebih meningkatkan mutu dari pembelajaran supaya tereksekusi atau terealisasi sesuai harapan dan tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari diciptakannya Permendikbud dan Undang-Undang mengenai Pendidikan Nasional.

2) Perlunya Menghindari diskriminasi dalam bayaran atau gaji pengajar beda agama. Selain itu, lebih memperhatikan faktor-faktor yang diperlukan dalam eksekusi kelas penghayat kepercayaan, seperti dana transportasi atau pemberian upah kepada pengajar agar semakin mendorong semangat pengajar ataupun memotivasi warga penganut penghayat kepercayaan yang lain untuk menjadi pengajar pada sekolah. Selain itu, kepada pengajar apabila tidak sanggup mengajar, akan lebih baik jika pihak sekolah atau pihak penghayat sendiri untuk mencari pengajar lain dengan waktu yang lebih banyak agar dapat lebih fokus pada bidang pendidikan untuk anak penghayat kepercayaan.
3) Kepada kedua sekolah untuk mengkaji ulang atau melakukan evaluasi praktek kelas penghayat kepercayaan yang sudah berlangsung. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari pemberian nilai yang bersifat subjektif. Perjalanan pemenuhan hak didik kepada penganut penghayat kepercayaan memanglah belum lama dan bisa dibilang masih baru. Maka dari itu, diperlukan perhatian lebih lanjut dalam penerapan kebijakan untuk lebih meningkatkan kualitas mutu pembelajaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, M. Sayuthi. *Metodologi Penelitian Agama.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Banks, James A dan Cherry A. McGee Banks edt. *Multikultural Education Issues and Perspective.* Amerika: John Wiley dan Sons, 2010.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualtatif Edisi Kedua.* Penada Media Group, 2011.

Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik Panduan bagi Orang Tua dan Guru dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD,* SMP, dan SMA. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Gorski, Paul C. *Multicultural Education and The Internet.* New York: The McGraw-Hill Companies, 2005).

Hashbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Inddonesia.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Ilyas, Mutholib. *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia.* Surabaya: CV AMIN Surabaya, 1988.

Kartapradja, Kamil. *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Masagung, 1985.

Kusaeri. *Acuan dan teknik Penilaian Proses dan Hasil Belajar Dalam Kurikulum 2013*. Surabaya: Ar-RuzzMedia, 2014.

Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Maksum, Ali dan Luluk Yunan Ruhendi. *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.a

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Muhammad Kholid Ismatulloh, "Agama dan HAM : Studi Kasus Tentang Kolom Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk", skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya: Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasution. *Metode Research.* Jakarta: PT Bumi AKsara, 2009.

Parekh, Bikhu. *Rethinking Multiculturalism.* Yogyakarta: Penerbit Kansiius, 2008.

Sjadzali, Munawir et al. *HAM dan Pluralisme Agama.* Jombang: CV. Fatma, 1997.

Sofwan, Ridin. *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa).* Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1999.

Spradley, James P. *The Etnographic Interview.* Amerika: Harcourt Brace Jovanovich College Publisher, 1979.

Suradi, *Pedoman Teknis Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kebijaksanaan Teknis Operasional Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.

Theresia Faradila Rafael Nong, "Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Right", skripsi tidak diterbitkan, (Makassar: jurusan Hukum Internasional Universitas Hasanuddin, 2013).

Jurnal

Ahmad Choirul Rofiq. *Kebijakan Pemerinrtah Terkait HakSipil Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya Terhadap Perakembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo.* Jurnal KodifikasiA, Vol. 8 No. 1 tahun 2014.

Edi Susanto. *Pendidikan Agama Berbasis Multikultural (Upaya Strategis Menghindari Radikalisme).* Jurnal Karsa, Vol. IX, No. 1, April 2006.

Gumilar Rusliwa Somantri. *Memahami Metode Kualitatif.* Jurnal Makara, Vol. 9, No. 2, Desember 2005.

Jarman Arroisi. *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan: Membaca Tradisi dan Budaya Sinkretisme Masyarakat Jawa.* AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 1, No. 1, 2015.

Oki Wahyu Budijanto. *Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung.* Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol. 7 No. 1, Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Nur Prabowo. *Kewarganegaraan Multikultural (Pembelaan Will Kymlicka atas hak-hak Minoritas Bangsa dan Etnis).* Jurnal Rasail Stebi AlMuhsin: Edisi 4, No. 7.

Wiyanto. *Implementasi Nilai-Nilai Multikultural pada Sekolah Multi-Etnik (Studi Interaksi Sosial Di SMA Karangturi).* ,Jurnal Ecodunamika, Vol 1 No. 3 Tahun 2018.

Wenni Wahyuandari dan Desi Rahmawati. *Pendidikan Multikultural Studi Kasus di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Tulungagung.* Jurnal Universitas Tulungagung Bnorowo, Vol. 2 No. 1, Tahun 2014.

Website

Anonim, "20 Macam Macam Metode Pembelajaran Lengkap", Dosen Psikologi, https://dosenpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran , (Selasa, 9 April 2019).

Anonim, "Aliran kerohanian Sapta Darma", Blogkejawen.blogspot.com/2011/03/alirn-kerohanian-sapta-darma-.html?m=1, (Selasa, 9 April 2019).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah SMPN 59 Surabaya*, dalam http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/4FED487F26A3A7B66FE2. (24 Februari 2019).

Kementerian Penbdidikan dan Kebudayaan. *Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah SMAN 9 Surabaya*, dalam http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/C7901035D043191BF563, (24 Februari 2019).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan*, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jendaral Kebudayaan, 2017.

Kementrian Luar Negeri, *Indonesia Meratifikasi Hak-hak sipil dan Politik dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-Meratifikasi-Kovenan-Hak-hak-Sipil-dan-Politik-dan-Kovenan-Hak-hak-Ekonomi-Sosial-dan-Buda.aspx. (06 November 2018).

Kristian Erdianto. *Mendikbud Larang Sekolah Mendiskriminasi Siswa Penghayat Kepercayaan*, dalam https://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/19223101/mendikbud-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larang-sekolah-mendiskriminasi-siswa-penghayat-kepercayaan. (24 Desember 2018).

Lukas Adi Prasetya, "Sapta Darma Bukan Aliran Sesat", Kompas, https://nasional.kompas.com/read//2008/10/14/20390080/sapta.darma.bukan.aliran.sesat , (Selasa, 9 April 2019).

Peraturan pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Perda Jawa Timur No. 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Permendikbud Indonesia Nomor 27 tahun 2016.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Sipil dan Politik

Rencana Strategis Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Rofiuddin, *Sekolah Berkukuh Siswa Penghayat Kepercayaan Tak Naik Kelas*, dalam https://nasional.tempo.co/read/793197/sekolah-berkukuh-siswa-penghayat-kepercayaan-tak-naik-kelas.(24 Desember 2018).

Udin, *Pengembangan Kebijakan Pendidikan Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, dalam https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36920354/Aminuddin_Bakry.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1551892854&Signature=JAu7CfYOlE9JWD2o03rvBTHpHQs%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DSEBAGAI_KEBIJAKAN_PUBLIK.pdf. (12 Maret 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Informan

Dian Jennie Tjahjawati selaku pengajar di kedua sekolah

Nanda Ryan Meg selaku informan dari SMA 9

M. Shadeli selaku informan dari SMA 9

Kardiono selaku informan dari SMA 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poerbo selaku informan dari SMA 9

Habib selaku informan dari SMA 9

Bangkit Mulya Sari selaku informan dari SMP 59

Nur Diana Dewi selaku informan dari SMP 59

Hernowo selaku informan dari SMP 59.

Fitria Isni Amaliyah selaku informan dari SMP 59

Hana Muftakhurini selaku informan dari SMP 59

Dondong selaku informan dari SMP 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id